

DIALOG GLOBAL

7.1

4 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Mesir
Pascarevolusi

Mona Abaza

Mempertanyakan
Realitas

Luc Boltanski

Lembaga
yang Luar Biasa

Sarah Mosoetsa

Merepresentasikan
Perempuan
Amerika-Afrika

Patricia Hill Collins

Sosiologi
Singapura

Vineeta Sinha,
Noorman Abdullah,
Youyenn Teo,
Francis Khek Gee Lim,
Daniel P.S. Goh

Perjuangan untuk
Aborsi di Polandia

Agnieszka Graff,
Elżbieta Korolczuk,
Julia Kubisa

Kolom Khusus

- > Jaringan Sosiolog Muda ISA
- > Menerjemahkan *Global Dialogue* ke dalam Bahasa Indonesia
- > Memperkenalkan Tim Editorial Indonesia

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa

VOLUME 7 / EDISI 1 / MARET 2017
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

DG



> Editorial

Selanjutnya Apa?

Walaupun semua penelitian survai kita canggih namun sangat sedikit yang meramalkan terpilihnya Donald Trump. Hal ini menunjukkan bahwa para sosiolog AS memiliki pengetahuan terbatas mengenai negara mereka sendiri. Meskipun terdapat beberapa kajian terkenal mengenai gerakan sayap kanan - dan kami telah menerbitkan satu kajian oleh Arlie Hochschild dua nomor yang lalu (GD6.3) - namun jumlahnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan kajian terhadap gerakan-gerakan yang berorientasi kiri. Tidak berbeda dengan orang lain, para sosiolog condong ke orang-orang yang berpikir dan bertindak seperti mereka sendiri, mempelajari gerakan-gerakan yang menentang diskriminasi, ketidaksetaraan, dan xenofobia. Kemampuan untuk dapat lebih memahami orang lain bukanlah soal menekan nilai-nilai dan komitmen kita sendiri - atau berpura-pura bahwa kita tidak memilikinya - melainkan menjadi lebih sadar terhadap adanya nilai dan komitmen orang lain tersebut. Dan hal ini akan menuntut pula agar kita menerjunkan diri ke dalam komunitas-komunitas yang tidak kita kenal.

Arti penting karya seperti itu cukup jelas dari artikel-artikel, dalam nomor ini dan nomor terakhir, yang mengkaji perjuangan mengenai hak-hak aborsi. Agnieszka Graff dan Elżbieta Korolczuk meneliti politik yang mendorong gerakan anti-gender di Polandia dan keterkaitannya dengan sentimen-sentimen anti-globalisasi yang lebih luas. Julia Kubisa menjelaskan gerakan payung yang luar biasa - protes anti-pemerintah - yang menyerbu ke jalan-jalan Polandia. Jalan-jalan dapat menjadi tempat bagi protes, tetapi juga bagi militerisasi, yang merupakan topik Mona Abaza yang melacak peristiwa-peristiwa yang bermula dari Revolusi Mesir 25 Januari sampai ke kontra-revolusi yang dipimpin oleh Jenderal El-Sisi.

Dalam edisi ini kami juga menerbitkan wawancara dengan sosiolog Prancis terkenal, Luc Boltanski. Dia menawarkan ringkasan bernas tentang sosiologi kritik, berasal dari kesenjangan antara realitas kelembagaan dan pengalaman dunia nyata. Benturan dan gangguan telah menjadi intensif manakala lembaga nasional semakin bentrok dengan dunia kita yang telah terglobalisasi. Ini juga merupakan tema lima artikel mengenai sosiologi Singapura. Mereka menjelajahi lintasan bangsa kecil ini maupun pada sosiologinya yang khas, setelah meninggalnya Perdana Menteri pertama mereka, Lee Kuan Yew. Esai-esai ini menggarisbawahi perbedaan antara ideologi yang berkuasa dan realitas yang hidup di bidang-bidang seperti mobilitas sosial, etnisitas, agama, dan politik.

Dari Asia kita beralih ke Afrika, khususnya Afrika Selatan di mana, selama dua tahun terakhir, universitas-universitas telah menjadi ajang sejumlah besar gejolak politik. Namun di sini kami mengarahkan perhatian pada suatu program akademis luar biasa yang diprakarsai oleh pemerintah dan dipimpin oleh sosiolog Sarah Mosoetsa. Lembaga beliau merintis dukungan bagi mahasiswa program doktor, konferensi, hibah buku, dan publikasi di bidang ilmu-ilmu sosial dan budaya.

Kami juga mempublikasikan sebuah wawancara yang dilakukan oleh Labinot Kunushevi, seorang sosiolog muda dari Kosovo, yang berbicara dengan sosiolog feminis terkenal Amerika-Afrika, Patricia Hill Collins. Edisi ini juga memperkenalkan tim *Global Dialogue* Indonesia dengan suatu kata pengantar yang menggambarkan beberapa tantangan dalam penerjemahan. Kami akhiri dengan peringatan Oleg Komlik mengenai karya yang sangat penting dari Jaringan Sosiolog Junior ISA. Ini merupakan salah satu proyek terpenting ISA - mendukung generasi sosiolog berikutnya.

> **Dialog Global** dapat diperoleh dalam 17 bahasa pada [website ISA](http://www.isa-berkeley.org)

> Naskah harap dikirim ke burawoy@berkeley.edu



Mona Abaza, seorang sosiolog Mesir terkemuka, penulis berbagai buku mengenai Islam dan kehidupan perkotaan, melakukan refleksi mengenai militerisasi pascarevolusi Januari.



Luc Boltanski, seorang ahli teori sosiologi kritik Prancis terkenal, membahas buku terbaru beliau mengenai novel detektif dan arti pentingnya bagi sosiologi.



Sarah Mosoetsa, seorang sosiolog Afrika Selatan yang menginspirasi, mendeskripsikan institut ilmu-ilmu sosial dan budaya unggul yang beliau kelola.



Patricia Hill Collins, seorang feminis Afrika-Amerika terkemuka, berbagi ide orisinalnya mengenai para cendekiawan dan marginalitas.



Dialog Global dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

> Dewan Redaksi

Editor: Michael Burawoy.

Rekan Editor: Gay Seidman.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Editor Konsultasi:
Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamin Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchiyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Editor Wilayah

Dunia Arab:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:
Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:
Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Eashrat Jahan Eyemoon, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin, Muhaimin Chowdhury.

Brasil:
Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:
Ishwar Modi, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragy Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:
Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Marjan Namazi, Vahid Lenjanzade.

Jepang:
Satomi Yamamoto, Fuma Sekiguchi, Yutaro Shimokawa.

Kazakhstan:
Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi.

Polandia:
Jakub Barszczewski, Paulina Domagalska, Adrianna Drozdowska, Łukasz Dulniak, Anna Gańko, Krzysztof Gubański, Kinga Jakiela, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zajac, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Jacek Zych, Łukasz Żołądek.

Rumania:
Cosima Rughiniş, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Costinel Anuţa, Maria-Loredana Arsene, Tatiana Cojocari, Florina Dincă, Andrei Dobre, Diana Alexandra Dumitrescu, Iulian Gabor, Rodica Liseanu, Mădălina Manea, Mihai-Bogdan Marian, Anca Mihai, Andreea Elena Moldoveanu, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa, Susana Popa, Diana Pruteanu Szasz, Ioana Silistraru, Adriana Sohodoleanu, Andreea Vintilă.

Rusia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova, Lubov Chernyshova.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turki:
Gül Çorbacioğlu, Irmak Evren.

Konsultan Media: Gustavo Taniguti.

> Dalam Edisi Ini

Editorial: Selanjutnya Apa? **2**

> WAWANCARA DARI SELURUH DUNIA

Nasib Mesir Pascarevolusi: Wawancara dengan Mona Abaza
oleh Michael Burawoy, AS **4**

Mempertanyakan Realitas: Wawancara dengan Luc Boltanski
oleh Laura Chartain dan Marine Jeanne Boisson, Prancis **9**

Lembaga yang Luar Biasa di Afrika Selatan: Wawancara dengan Sarah Mosoetsa
oleh Michelle Williams, Afrika Selatan **12**

Representasi Perempuan Amerika-Afrika: Wawancara dengan Patricia Hill Collins
oleh Labinot Kunushevci, Kosovo **16**

> SOSIOLOGI SINGAPURA

Setelah Lee Kuan Yew
oleh Vineeta Sinha, Singapura **18**

Setelah Multirasialisme
oleh Noorman Abdullah, Singapura **20**

Setelah Meritokrasi
oleh Youyenn Teo, Singapura **22**

Setelah Sekularisme
oleh Francis Khok Gee Lim, Singapura **24**

Setelah Globalisasi
oleh Daniel P.S. Goh, Singapura **26**

> PERJUANGAN UNTUK ABORSI DI POLANDIA

Menuju Masa Depan Iliberal: Anti-Genderisme dan Anti-Globalisasi
oleh Agnieszka Graff, Polandia dan Elżbieta Korolczuk, Swedia **29**

Memperjuangkan Hak Reproduksi di Polandia
oleh Julia Kubisa, Polandia **32**

> KOLOM KHUSUS

Jaringan Sosiolog Muda ISA
oleh Oleg Komlik, Israel **34**

Menerjemahkan *Global Dialogue* ke dalam Bahasa Indonesia
oleh Kamanto Sunarto, Indonesia **36**

Memperkenalkan Tim Editorial Indonesia **37**



> Nasib Mesir Pascarevolusi

Wawancara dengan Mona Abaza



Mona Abaza adalah profesor sosiologi di Universitas Amerika di Kairo. Beliau adalah seorang ilmuwan terkenal mengenai Mesir kontemporer, dan telah menulis banyak buku termasuk *Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds* (2002), *The Changing Consumer Culture of Modern Egypt* (2006), *The Cotton Plantation Remembered* (2013). Beliau pernah menjabat sebagai dosen tamu di berbagai penjuru dunia: Swedia, Singapura, Jerman, Prancis, Malaysia, Italia, dan Belanda. Dalam beberapa tahun terakhir beliau telah menulis tentang perubahan politik kontemporer di Mesir, dua di antaranya telah diterbitkan dalam *Global Dialogue* ([GD1.4](#) and [GD3.3](#)). Dalam wawancara dengan **Michael Burawoy**, beliau merefleksikan pada tahun-tahun setelah Revolusi 25 Januari 2011.

Mona Abaza.

MB: Anda telah banyak menulis, termasuk untuk *Dialog Global*, tentang peristiwa-peristiwa “revolusioner” 25 Januari (2011) yang mengakhiri 30 tahun kekuasaan Presiden Hosni Mubarak, yang menggerakkan suatu proses politik yang mengarah pada pemilihan presiden Mohammed Morsi dan kekuasaan pemerintahan Islam yang singkat (2012-2013). Morsi digulingkan pada bulan Juli 2013 dalam suatu perebutan kekuasaan, dan Jenderal El-Sisi mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 2014 dinyatakan sebagai Presiden Mesir. Bagaimana anda sekarang menilai enam tahun penuh gejolak sejak revolusi 25 Januari, dan khususnya peran militer?

MA: Terdapat banyak kontroversi mengenai keterlibatan tentara sejak Revolusi tanggal 25 Januari, ketika tank-tank militer turun ke jalan dan mengelilingi Lapangan Tahrir (*Tahrir Square*) sebelum tergulingnya Mubarak. Mereka seharusnya melindungi para pengunjung rasa terhadap para preman dari rezim Mubarak. Kemungkinan terbesar, lengsernya Mubarak akan sulit dibayangkan bila pihak angkatan bersenjata tidak menerima lampu hijau dari Washington untuk tetap netral terhadap revolusi. Andaikata pun di

hari-hari awal Januari 2011 telah terjalin suatu bentuk “persahabatan”¹ antara “rakyat” dan tentara, ada segudang perkiraan dan interpretasi mengenai memburuknya popularitas tentara seiring berjalannya waktu.

Coba ingat beberapa gambar ikonik yang secara global beredar pada tahun 2011, gambar dari para demonstran yang tidur di bawah tank, atau cercaan dan slogan-slogan anti-Mubarak yang ditulis pada tank, atau para perempuan usia lanjut yang mencium tentara di Tahrir setelah Mubarak dilengserkan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa tank tentara kuno yang sama (yang mungkin sama sekali tidak praktis untuk melakukan suatu perang dalam kota) telah mengambil alih dan mengepung gedung televisi di jalan Maspero pada tanggal 28 Januari. Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah aksi cukup simbolis yang mengulang tindakan *Free Officers* [gerakan perwira di bawah Naguib dan Nasser] dalam mengambil alih stasiun penyiaran dan mengumumkan Kudeta/Revolusi Juli 1952 ketika mereka menggulingkan Raja Farouk. Namun, setelah mengambil alih SCAF (*The Supreme Council of Armed Forces*, Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata), popularitas tentara terus menurun. Berkembangnya insiden-insiden seperti



Tembok Kasr al Aini yang kini telah dibongkar dan telah diganti dengan sebuah gerbang. Grafiti oleh Alaa Awad.
Foto oleh Mona Abaza, 7 Desember 2012.

serangan terhadap para pengunjung rasa di Tahrir pada bulan Maret 2011, penyiksaan dan tes keperawanan terhadap demonstran perempuan, pembantaian di Maspero bulan Oktober 2011 pembantaian Ultra Ahly di Port Said, dan kemudian insiden kekerasan di Jalan Muhammad Mahmud pada bulan November dan Desember 2011, kesemuanya menandakan bahwa tentara telah bergeser menjadi fihak kontra revolusi.

Dengan menoleh ke belakang, kita harus mempertanyakan penafsiran bahwa pada bulan Januari tentara benar-benar berada di sisi para demonstran. Intervensi militer mungkin bukan terutama soal mendukung aspirasi kebebasan dan demokrasi, melainkan bahwa adanya Lapangan Tahrir membuka peluang emas untuk menyisihkan Hosni Mubarak dan calon ahli warisnya Gamal Mubarak beserta kelompok kapitalis kroninya (*crony capitalists*) yang cengkeramannya atas perekonomian berbenturan dengan militer yang juga menguasai bagian penting perekonomian. Namun digulingkannya Morsi oleh militer pada tahun 2013 merupakan suatu peristiwa yang berbeda sama sekali, sebab El-Sisi sekarang digambarkan sebagai seorang pahlawan nasionalis yang melawan jaringan Islam global yang dipromosikan oleh Persaudaraan Muslimin [Ikhwanul Muslimin].

MB: Kita nanti akan ke membahas kembali ideologi nasionalis dan landasan ekonominya, namun bukanlah militer juga terobsesi dengan pemulihan keter-tiban?

MA: Memang, setelah Januari 2011 militer ada di mana-

mana, nampak terutama dalam mengubah wajah kota. Dalam memori kolektif, tank tentara terus muncul di jalan-jalan di pusat kota, menghilang dan muncul kembali di jalan-jalan di pusat kota dari 2011 sampai 2014. Kami menyaksikan pembangunan dinding beton sebagai zona pemisah antara demonstran dan pasukan polisi, kerusakan dan pembongkaran dinding-dinding tersebut oleh warga, pemblokiran seluruh area untuk langkah-langkah keamanan; pengendalian vertikal terhadap kota melalui ancaman helikopter yang berputar di atas pada saat-saat puncak; banyaknya serangan, pengunduran diri, dan pembunuhan oleh pasukan polisi di jalan-jalan pusat kota yang ramai yang berlangsung antara 2011 dan 2013; gas air mata mematikan yang mengakibatkan banyak kematian dan epilepsi; munculnya pasukan paramiliter yang baru yang berbaris di dalam kota. Suatu episode puncak dalam perang perkotaan ini terjadi saat pembantaian Rabe'a al-'Adawiyya terhadap anggota Persaudaraan Muslimin pada bulan Agustus 2013. Serangan teroris yang semakin berciri militer oleh kelompok Islam memunculkan suatu serangan militer yang disajikan sebagai suatu "perang melawan teror," diikuti dengan pembangunan suatu dinding cekung raksasa (meniru Zona Hijau di Baghdad) di sekitar bangunan resmi pemerintah dan kedutaan di seluruh kota. Kami memiliki begitu banyak visualisasi yang jelas mengenai militerisasi di kehidupan perkotaan sehari-hari, yang menimbulkan suatu cara hidup baru untuk menghadapi, menghindari, atau menolak pengendalian militer.

MB: Dan di balik tumbuhnya militerisasi kehidupan perkotaan, apa yang terjadi pada kompetisi untuk pengendalian ekonomi?



Tembok cekung yang baru dibangun, didirikan di seberang gerbang masuk ke Universitas Amerika di Kairo.

Foto oleh Mona Abaza, 21 September 2015.

MA: Karya yang sangat penting dari Zeinab Abul-Magd² mungkin merupakan salah satu studi pertama yang telah menunjuk pada besarnya keterlibatan tentara dalam perekonomian saat ini dan mengapa kegiatan mereka dibiarkan buram. Menurut Abul-Magd, angkatan bersenjata telah terlibat secara finansial selama beberapa dekade, dengan kontribusi yang diperkirakan sekitar 25% sampai 40% dari perekonomian Mesir. Ini termasuk mega proyek, pabrik-pabrik besar di industri makanan dan minuman, mengendalikan kafetaria dan pompa bensin. Seperti yang saya katakan, ini menjelaskan mengapa tentara memilih untuk mengusir Mubarak dan kelompok kapitalis kroni anaknya karena mereka merupakan suatu elit pesaing.

Tetapi di atas segalanya, berkat suatu undang-undang yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan lahan dimanapun untuk tujuan komersial, militer telah mampu menguasai *real estate* dalam jumlah besar. Bukti nyata paling signifikan adalah keterlibatan tentara dalam proyek-proyek raksasa di gurun pasir di mana mereka telah mengembangkan usaha patungan dan spekulasi yang secara finansial menguntungkan. Ini menjadi semakin nyata dengan adanya Laporan *Mada Masr* yang mengungkapkan bahwa Badan Pertanahan Angkatan Bersenjata (*Armed Forces Land Projects Agency*) bersama-sama dengan Sheikh Zayed dari Abu Dhabi telah mengambil alih 16.000 hektar dan pengawasan terhadap pembangunan Ibukota Baru (*New Capital City*) baru-baru ini.³ Setahun sebelumnya, El-Sisi mengumumkan keterlibatan militer dalam pembangunan perumahan bersama dengan perusahaan *Arabtec* dari Uni Emirat Arab, dengan nilai \$ 40 miliar.⁴ Kemudian *Cairoobserver* mengungkapkan kepada kami bahwa

pada tahun 2014 Kementerian Pertahanan menandatangani suatu perjanjian dengan Emaar, perusahaan besar berbasis di UEA, untuk membangun *Emaar Square* raksasa yang akan mencakup pusat perbelanjaan terbesar di kawasan perkotaan Kairo, sebagai pesaing Lapangan Tahrir yang merupakan pasar neo-liberal dengan berorientasi ke Dubai.

Suatu ekonomi pasar impian semacam ini dibayangkan di bawah suatu kekuasaan otoriter militer di mana tentara mengendalikan pasar lahan yang luas tanpa transparansi terhadap transaksi-transaksinya.⁵ Tentu saja, ini bukan pertama kali suatu ekonomi pasar dengan impian neo-liberal bergandengan tangan dengan rezim militerisme otoriter.

MB: Anda telah menguraikan arti bangkitnya kekuasaan Jenderal El-Sisi bagi kaum elit ekonomi. Apa arti hal tersebut bagi pihak rakyat, khususnya bagi “jalanan” yang telah menjadi sedemikian terkenal dalam Arab Spring dan yang telah sedemikian banyak anda tulis?

MA: Setelah kekuasaan singkat dari kaum Islamis di bawah Morsi, 2012-2013, bagi banyak orang, pendudukan tentara atas jalan-jalan berarti “pemulihan ketertiban,” namun nampaknya juga berarti pengembalian tokoh-tokoh politik dan finansial besar dari rezim lama. Setelah Januari 2011, rakyat di jalanan menyaksikan kekuasaan para preman (walaupun mereka para preman rezim lama) bersama-sama dengan peningkatan kejahatan dan kekerasan. Ribuan pedagang kaki lima menduduki ruang yang terbayangkan maupun tidak, menempati keseluruhan

jalan, sudut-sudut di atas dan di bawah jembatan, jalan dan gang di sepanjang seluruh kota, dan dengan sendirinya menghambat lalu lintas – bagi kelas-kelas menengah kesemuanya ini melambangkan suatu “ketidakteraturan” yang mengerikan. Tetapi kenyataan publik mengenai pedagang jalanan mengisahkan banyak hal kepada kita mengenai konsekuensi kegagalan kebijakan neo-liberal selama bertahun-tahun yang memiskinkan jutaan orang, termasuk para lulusan universitas, yang menyisakan kepada mereka berdagang di jalanan sebagai satu-satunya pilihan untuk dapat bertahan hidup.

Restorasi kota oleh El-Sisi ini berlangsung dengan suatu kampanye besar-besaran untuk “membersihkan” pusat kota, melalui penggusuran paksa pedagang kaki lima yang merupakan tumpuan sekitar lima juta orang yang bertahan hidup di sektor informal.

MB: Jadi, walaupun militer telah berhasil menegaskan kembali pengendalian atas jalanan, yang merupakan suatu bentuk negatif dari kekuasaan, El-Sisi tetap berhasil mengamankan dukungan rakyat untuk pemerintahan militer?

MA: Bertentangan dengan apa yang dipercayai beberapa pakar dari Barat, El-Sisi mendapatkan popularitas dengan wacana memulihkan “ketertiban” dan stabilitas, bahkan sebelum ia menjadi presiden. Bagaimana lagi kita bisa menafsirkan suksesnya rezim penguasa dalam kampanye partisipasi warga untuk pembelian saham dan obligasi dalam proyek Terusan Suez? Hanya dalam beberapa minggu, sekitar \$ 8,5 milyar telah berhasil dikumpulkan dari investor lokal. Kemampuan El-Sisi untuk menyentuh rasa sentimen nasionalisme terbukti sangat efektif.⁶

David Harvey mengingatkan kita bagaimana restorasi Paris oleh Louis Napoleon Bonaparte – Napoleon III yang memerintah antara 1852-1870 – sangat tergantung pada penggalan nilai surplus (*surplus value*) melalui penguasaan kapitalis terhadap kota. Transformasi Paris yang terjadi di bawah Napoleon berjalan bergandengan tangan dengan mempraktikkan despotisme lanjut dan perampasan hak – suatu analogi yang mencolok dengan rezim El-Sisi. Kedua rezim keteraturan (*order*) tersebut terpicat dengan proyek-proyek infrastruktur megah. Keduanya melihat Terusan Suez sebagai sebuah proyek pembangunan bangsa. Napoleon membiayai penggalan Terusan, sementara El-Sisi saat ini bekerja untuk memperbesarnya. Kedua “restorasi” sangat mirip: keduanya melihat bahwa perluasan infrastruktur sangat penting untuk mengambil alih sumber daya kapitalis kota. Tentara Mesir, misalnya, saat ini sedang sangat sibuk membangun jalan raya dan jembatan ke kota-kota provinsi dan di sekitar Kairo.

MB: Perbandingan ini sangat menarik, tetapi jika kita mencari kesamaan sejarah secara lebih dekat dengan keadaan setempat, bagaimanakah perbandingan antara proyek nasionalis El-Sisi dengan proyek nasionalis Nasser?

MA: Memang, ketika Morsi digulingkan oleh tentara pada tahun 2013, El-Sisi sering dibandingkan dengan Gamal Abdel Nasser – El-Sisi berusaha keras untuk menekankan retorika nasionalisme, yang bertentangan dengan jaringan internasional Persaudaraan Muslimin (yang diduga teroris) yang digambarkan berbahaya. Ketika peresmian pelebaran “Terusan Suez Baru” (*New Suez Canal*) berlangsung pada bulan Agustus 2015, El-Sisi sekali lagi memunculkan pesan nasionalisme dalam simbolisme yang ia terapkan. Armada yang digunakan untuk peresmian tersebut adalah armada milik keluarga kerajaan yang telah digulingkan – armada yang sama yang pernah mengusung Ratu Eugenie pada peresmian asli Terusan Suez pada tahun 1869. Upacara tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu keinginan untuk bergabung dalam kebanggaan nasional pada proyek infrastruktur megah dengan jalan merujuk pada budaya kolonial/kosmopolitan yang menarik bagi sentimen neo-liberal. Bahwa di antara para delegasi internasional yang hadir pada tahun 2015 tersebut Presiden François Hollande mendapat perhatian terbesar menandakan adanya kesinambungan sejarah dengan Prancis. Menarik pula untuk diperhatikan bahwa nasionalisasi Terusan Suez di bawah Nasser pada tahun 1956 hampir tidak disebut-sebut.

MB: Baik sekali, jadi anda menunjuk ke beberapa megaprojek yang berusaha menunjukkan sentimen nasionalisme; tetapi bagaimana dengan pengaturan nasionalis dalam kehidupan sehari-hari? Saya tahu anda sangat tertarik pada arsitektur kota tersebut; apa yang telah berubah di bidang ini?

MA: Di sini kita pun bisa melihat perubahan yang mengingatkan pada nasionalisme masa lalu. Saat kita sedang berbicara ini, pusat kota *Belle Époque*, yang dibangun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sedang mengalami perubahan wajah melalui pemutihan tembok secara besar-besaran, misalnya, dari bangunan di sekitar *Talaat Harb Square*. Hal ini persis seperti yang pernah dilakukan di bawah Mubarak.⁸ *Orabi Square* yang besar telah ditransformasi menjadi suatu zona pejalan kaki sementara pemerintah terus menutup hampir semua kafe populer di *Sherifein Street*. Sekali lagi, ini bisa ditafsirkan sebagai suatu langkah populis, meningkatkan sentimen keagungan nasionalisme, dan, di atas segalanya, “keteraturan” di jalanan.

MB: Dan di sinipun, apakah ada kepentingan ekonomi yang bersembunyi di balik gerakan populis tersebut?

MA: Ya, di sini pun ada kepentingan mapan (*vested interests*) dalam mengubah pusat kota *Belle Époque* yang bangunan bersejarahnya telah menarik kaum kapitalis dan pengusaha besar dengan maksud menguasai pusat kota dan nilai surplusnya. Perusahaan Real Estate Al-Ismaelia telah berhasil menguasai sejumlah besar bangunan bersejarah di pusat kota Kairo seperti *Art Deco Gharib Morcos Building* (dibangun 1916), *Kodak*

Building (dibangun 1924), *Davis Bryan Building*, *Abdel Khalek Tharwat Building* (dibangun 1920), dan *Cinema Radio* (dibangun 1930-an).⁹ Bangunan-bangunan Kodak, termasuk bagian-bagian yang lebar di sekitar sinagoga Yahudi, telah direnovasi dengan cara yang sangat canggih.

MB: Jadi proyek nasionalis menyembunyikan kepentingan ekonomi; tetapi, adakah kepentingan lain yang bermain di balik populisme El-Sisi?

MA: Benar. Wacana kembalinya “ketertiban” dan stabilitas telah menutupi keprihatinan perihal pelanggaran hak asasi manusia, pemenjaraan dan penghilangan secara massif terhadap para aktivis. Semua ini tampaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masalah yang menentukan tetaplah krisis ekonomi yang belum terselesaikan dan akut, korupsi sistematis di lingkaran pejabat dan represi berkelanjutan oleh polisi, seolah-olah tidak pernah terjadi revolusi. Meningkatnya ketidakpuasan di kalangan mereka yang selama ini masih merupakan mayoritas senyap (*silent majority*) mengundang prediksi mengenai akan adanya suatu ledakan sosial lain, meskipun biaya kemanusiaan suatu kemungkinan pemberontakan terhadap tentara pasti sangat tinggi karena pasti akan melibatkan kekerasan lebih lanjut. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mona Abaza <mona.abaza@gmail.com>

¹ Lihat Ketchley, N. (2014) “The people and the army are one hand!” *Comparative Studies in Society and History* 56(1): 155-186.

² Abul-Magd, Z. (2016) “The Army and the Economy in Egypt.” *Midan Masr*, Agustus 7, 2016, <http://www.midanmasr.com/en/article.aspx?ArticleID=222>

³ Sawaf, L. (2016) “The Armed Forces and Egypt’s Land.” *Mada Masr*, April 26, 2016, <http://www.madamasr.com/en/2016/04/26/feature/economy/the-armed-forces-and-egypts-land/>

⁴ Saba, J. (2014) “The military and the state: The role of the armed forces in post-30 June Egypt.” September 27, 2014, <http://www.dailynewsegypt.com/2014/09/27/military-state-role-armed-forces-post-30-june-egypt/>

⁵ “From Tahrir Square to Emaar Square,” *Cairoobserver*, Februari 23, 2014, <http://cairoobserver.com/post/77533681187/from-tahrir-square-to-emaar-square#.WHN1ptLhCM8>

⁶ Oakford, S. (2014) “Egypt’s Expansion of the Suez Canal Could Ruin the Mediterranean Sea,” Oktober 9, 2014, <https://news.vice.com/article/egypts-expansion-of-the-suez-canal-could-ruin-the-mediterranean-sea> (diakses Desember 2, 2016).

⁷ Abaza, M. (2014) “Post January Revolution Cairo: Urban Wars and the Reshaping of Public Space.” *Theory, Culture & Society*, September 30, 2014.

⁸ *Ibid.*

⁹ <http://al-ismaelia.com/buildings/>, diakses Desember 2, 2016.

> Mempertanyakan Realitas

Wawancara dengan Luc Boltanski

Luc Boltanski tergolong salah seorang sosiolog masa kini yang paling terkemuka. Pernah menjadi mitra kerja Pierre Bourdieu, beliau adalah Direktur Penelitian di *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales* (EHESS) – Sekolah Tinggi Ilmu-ilmu Sosial di Paris. Pada tahun 1990-an, beliau mengkaji organisasi kapitalisme dan bentuk-bentuk baru dominasinya dalam sebuah buku sangat terkenal yang ditulis bersama Eve Chiapello, *Le nouvel esprit du capitalisme* (Semangat Baru Kapitalisme) yang diterbitkan di dalam Bahasa Prancis pada tahun 1999. Penelitian beliau kemudian bergeser ke arah kajian terhadap tindakan-tindakan yang kritis dan sosiologi negara. Publikasi *De la critique* pada tahun 2009 – diluncurkan dalam bahasa Inggris pada tahun 2011 dengan judul *De la critique* (Mengenai Kritik) – ditandai suatu titik balik dalam refleksiya mengenai hubungan antara institusi-institusi dan realitas. Pada tahun 2012, beliau menerbitkan *Énigmes et complots* (Teka-teki dan Komplotan), sebuah buku tentang asal-usul dan difusi novel-novel detektif sejak abad ke-19.

Para pewawancara, **Laura Chartain** dan **Marine Jeanne Boisson**, adalah kandidat doktor di EHESS Paris, Prancis. Dengan fokus pada proses yang ditempuh Luc Boltanski dalam bukunya, *Énigmes et complots*, mereka mengeksplorasi penggunaan perangkat dan pendekatan sosiolog dalam mempertanyakan dan mengkritik institusi. Diskusi di bawah ini merupakan ringkasan dari suatu wawancara lebih panjang yang diterbitkan dalam [Global Express](#).



Luc Boltanski.

LC & MJB: Pertama-tama, bagaimana anda sampai pada ide untuk mengkaji novel-novel detektif?

LB: saya sama sekali bukan, atau nyaris sama sekali bukan seorang pembaca novel-novel detektif! Seperti orang lain, saya cenderung untuk membacanya ketika saya tidak

dapat tidur, tetapi pada dasarnya saya ingin memahami mengapa genre sastra seperti ini yang khususnya tidak selalu mempesona dan yang menyampaikan suatu gambaran yang cukup konservatif mengenai masyarakat memiliki daya tarik sejak awal. Memang, novel detektif telah menjadi sebuah genre kunci karya naratif, dalam bentuk buku dan kemudian film atau film seri televisi. Itu sungguh menarik.

Karena memiliki karir yang melibatkan penyelidikan dan, selain itu, secara biografis, memiliki seorang anak laki-laki yang menjadi wartawan, saya ingin mempelajari berbagai jenis penyelidikan. Ketika saya sedang menulis buku ini, “peristiwa” dan “skandal politik” sedang melanda Prancis di bawah Presiden Nicolas Sarkozy. Peristiwa dan skandal politik ini melibatkan penyelidikan dan kontra penyelidikan. Saya bertanya pada diri sendiri mengapa “penyelidikan” telah mengambil peran sedemikian penting dalam dunia Barat abad dua puluh. Pertanyaan ini menuntun saya untuk menjajaki persamaan dan perbedaan antara berbagai jenis penyelidikan dan berbagai cara untuk melaksanakannya.

LC & MJB: Apakah anda bermaksud untuk mempelajari asal-usul novel detektif?

LB: Ini merupakan suatu pendekatan lama Durkheim maupun, dengan cara lain, pendekatan Foucault, yang dikenal sebagai “arkeologi.” Kita memahami suatu fenomena dengan lebih baik ketika kita memegangnya dari asal-usulnya, maksudnya sebelum sesuatu tersebut

berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda melalui “*effets de champ*,” mengikuti garis-garis yang dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu. Pertama, sebuah genre baru diciptakan dan kemudian berbagai produsen berinovasi dan mencoba untuk membedakan diri dari satu sama lain dalam bidang ini. Dengan cara itu mereka memodifikasi genre. Dalam jangka waktu lebih dari satu abad, telah ada sejumlah besar novel detektif atau mata-mata dengan gaya yang berbeda-beda. Saya sedang mencoba untuk kembali ke periode ketika genre ini pada awalnya muncul. Saya ingin menerapkan suatu metode kuasi struktural untuk mengkaji novel detektif dan menginterogasi kekhususan sejarah pada masa genre baru ini muncul. Tetapi saya menganggap buku ini sebuah sketsa, atau lebih tepatnya suatu gudang masalah, ketimbang seperangkat jawaban!

LC & MJB: *Dalam Énigmes et complots, anda mengembangkan ide bahwa setiap penyelidikan dapat dipimpin oleh aktor sosial sendiri ketika mereka melihat suatu kesenjangan antara “realitas” yang dibentuk oleh institusi-institusi dan “dunia” yang mereka alami tiap hari. Kesenjangan ini kemudian dapat memicu ketidaksepakatan, keraguan, dan saling mempertanyakan di antara para aktor. Dalam buku ini, anda menunjukkan bahwa “teka-teki terdiri atas sesuatu yang memanifestasikan dirinya dalam pengoperasian tatanan sosial yang mungkin dapat menghancurkan realitas.”*

LB: Memang, *énigme* (teka-teki) merupakan novel detektif khas seperti yang diciptakan oleh Edgar Allen Poe. Para psikolog *gestalt* juga menangani gagasan *énigme* ini, yang berasal dari sesuatu yang mengganggu apa yang dianggap stabil dan tampaknya sudah jelas. Dasar konseptual buku bergantung pada suatu perbedaan yang saya kembangkan dalam karya saya sebelumnya, *De la critique*, antara realitas dan dunia. Perbedaan ini memainkan suatu bagian yang sangat penting dalam karya saya. Singkatnya, *realitas* mengacu pada suatu tatanan stabil yang dibentuk oleh institusi sedangkan *dunia* merujuk kepada semua yang dapat muncul tak terduga dalam pengalaman aktor sosial dan yang dapat mempertanyakan *realitas*.

Pembedaan ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh paradigma konstruksi sosial realitas. Masalah ini dirumuskan di dalam buku yang terkenal oleh Ian Hacking, *The Social Construction of What?* Jika semuanya dikonstruksi, bagaimana, dari sudut pandang apa, kita dapat menangkap konstruksi ini? Bukankah dekonstruksi, yang dihasilkan dari penentuan bahwa fakta adalah “konstruksi sosial,” selalu memerlukan suatu konstruksi baru? Apakah pendekatan ini tidak akan menyebabkan suatu relativisme umum yang pada akhirnya akan menjadikan karya sosiolog benar-benar sewenang-wenang juga? Oleh karena itu, saya ingin menganggap ide konstruksi sosial realitas ini benar-benar serius, melacaknya ke cara-cara institusi sosial membentuk realitas. Dengan membedakan *dunia* dari *realitas*, kita dapat menemukan suatu titik acuan yang memungkinkan kita untuk membedakan konstruksi realitas dengan pengalaman yang berlabuh di dunia. Oleh karena itu, kita harus menyisihkan teori-teori “akal sehat” – yang diwarisi dari pencerahan Skotlandia, dari Moore, dan dengan cara tertentu dari Schütz.

Penting untuk memulai dengan suatu postulat mengenai ketidakpastian yang mengelilingi tindakan. Tetapi, tentu saja, pengalaman kita juga untuk sebagian berlabuh dalam realitas! Untuk memberikan suatu contoh yang sangat sederhana, ketika anda menunggu bus, anda berharap agar bus datang setiap 15 menit; ini adalah suatu pengalaman yang berlabuh di *format* realitas. Ada sebuah halte bus, ada perusahaan bus dan kemudian ada kota yang membangun halte bus dan mengatur jadwal. Namun, bus mungkin tidak datang dengan berbagai alasan tak terduga yang datang dari dunia. Oleh karena itu, sebagian besar pengalaman kita juga berlabuh di dunia dan ditandai dengan ketidakpastian. Pengalaman-pengalaman ini jauh lebih sulit untuk dibuat eksplisit.

Bingkai-bingkai dari aksi yang dibentuk oleh institusi-institusi mudah digambarkan dan dijumlahkan karena mereka sudah diobyektifkan dalam karya-karya penulisan dan akuntansi yang dicapai untuk sebagian, tetapi bukan hanya, oleh karya negara yang memilih elemen untuk diekstraksikan dari dunia. Dunia tidak dapat dijumlahkan karena bersifat tidak pasti, variabel, dan jamak. Kita dengan demikian dapat medeskripsikan bagaimana aktor sosial dihadapkan dengan format realitas yang dibentuk oleh institusi, bagaimana mereka mengkritiknya, bagaimana mereka berdebat tentangnya, dan bekerja untuk format baru yang rumit. Kritik, untuk sebagian besar, membantu untuk menjelaskan genre pengalaman ini.

Oleh karena itu, saya ingin mempertimbangkan bagaimana konstruksi realitas dikaitkan dengan institusi yang mengatur perangkat sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian semacam itu. Dalam *Énigmes et complots*, saya melihat sebuah proyek khas dari negara-negara Eropa, terutama bentuk-bentuk demokratis mereka di paruh kedua abad kesembilan belas, sebagai upaya untuk benar-benar menstrukturkan realitas atau membuat tindakan dapat diprediksi, dengan merujuk baik pada hukum – maksudnya, perangkat penertiban – dan pada ilmu-ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam. Ide tersebut untuk sebagian besar berasal dari gagasan Foucault mengenai biopolitik.

Mari saya beri anda suatu contoh lain yang sangat saya sukai. Ketika kami masih muda di tahun 70-an saya mempunyai seorang teman berhaluan kiri dan feminis yang berkomitmen. Dia ikut gerakan ultra-kiri bersama perempuan dan laki-laki lain dari kelompok minoritas. Suatu hari, para gadis saling memandang dan menyadari bahwa mereka, para perempuan, yang mengisi amplop dengan selebaran, bahwa merekalah yang membuat kopi, dll. Lalu apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka mengusir para pemuda, mengunci diri mereka di kantor dan berbicara bersama selama dua puluh empat jam terus-menerus. Dan itu adalah sebuah peristiwa kunci dalam kelahiran feminisme di Prancis! Sebelumnya, kebanyakan di antara mereka telah memiliki pengalaman dalam analisis, psikoanalisis, sehingga mereka tidak mulai dari nol. Saya pikir gerakan-gerakan ini berkembang melalui pembelajaran – melalui sosiologi, psikoanalisis, tindakan berorganisasi, dapat jenis pembelajaran apa saja – untuk menangkap pengalaman dan mencoba untuk berbaginya.

LC & MJB: *Bagaimana para sosiolog menjelaskan pengalaman para aktor?*

LB: Untuk mengejar objektivitas, para sosiolog perlu menghubungkan instrumen deskripsi dengan titik-titik acuan yang memungkinkan kita untuk mengambil suatu pandangan kritis mengenai realitas ini. Ini tidak dapat dikaitkan dengan moral tertentu, karena titik-titik referensi kritis ini malah harus mengklaim universalitas tertentu, seperti yang telah saya jelaskan dalam *De la critique*. Salah satu cara untuk melangkah ialah dengan mengikuti para aktor di kala mereka mengkritik. Para aktor ini realis. Mereka mempertimbangkan situasi di mana mereka bertindak sehingga mereka dapat memanfaatkan berbagai konteks untuk keuntungan mereka, mengatakan hal yang berbeda di tiap situasi, misalnya. Sehingga seorang pekerja dapat sangat sopan kepada atasannya namun sangat kritis di rumah.

Saya pikir kita harus mengikuti proses konstruksi sosial, bagaimana cara orang-orang sendiri mengkonstruksikan dunia. Pada awalnya, setiap pengalaman bersifat khusus, di dunia hanya ada pengalaman tunggal. Orang kemudian akan berbagi pengalaman tersebut, menjadikannya setara, memberikan bahasa kepadanya, mengubahnya menjadi tuntutan, dan berupaya untuk mengkonstruksikan usulan dan klaim, serta modifikasi realitas dan format yang menjadi landasan realitas. Sangat menarik untuk mengikuti sedekat mungkin operasi kualifikasi dan kritik maupun cara berbagai elemen realitas dikonstruksikan dan didekonstruksikan. Anda mengikutinya dengan membaca novel, anda mengikutinya dengan melakukan wawancara, dan anda mengikutinya dengan mengamati perbedaan pendapat. Pekerjaan sosiologi harus mengikuti konstruksi dan dekonstruksi, dan upaya untuk mendirikan format realitas baru.

LC & MJB: *Apakah menurut anda sosiolog harus melangkah lebih jauh dan berangkat dari rencana aksi para aktor dan institusi-institusi untuk mencoba menganalisis kerangka yang menjadi sandaran mereka?*

LB: Saya sekarang berpikir tidak mungkin untuk melaksanakan sosiologi yang sepenuhnya pragmatis, seluruhnya didasarkan pada analisis situasi. Kebetulan, para aktor sendiri tidak melakukannya! Mereka tahu lingkungan hidup mereka tergantung pada keputusan terhadap mana kontrol mereka sangat terbatas, sebagai individu, dan terutama, terhadap institusi yang mengatakan *apa adalah apa*, membentuk situasi yang ada. Tetapi mereka dapat memanfaatkan kontradiksi yang selalu mengancam cara institusi mengkonstruksikan realitas demi keuntungan mereka sendiri. Kembali ke contoh awal saya mengenai bus, mereka dapat, misalnya, menunjukkan bahwa, meskipun bus seharusnya tepat waktu, dalam praktek hal ini hampir tidak pernah terjadi.

Untuk mengkritik penciptaan format realitas, sosiolog tidak mengandalkan pada klaim moral tertentu tetapi pada pekerjaan aktor sosial yang mempertanyakannya dan yang mencoba untuk menetapkan format yang lebih adil. Tetapi sosiolog mungkin mencoba untuk melangkah lebih jauh ketimbang mengikuti para aktor dalam upaya mereka untuk menetapkan format realitas yang baru. Mereka harus menggunakan alat-alat penjumlahan yang mengobyektifkan apa yang mendasari stabilisasi pengalaman aktor. Mereka harus melaksanakan suatu operasi yang hampir mustahil,

terdiri atas menghubungkan deskripsi jenis pekerjaan ini dengan suatu penilaian normatif. Dalam buku saya *De la critique*, saya menjelaskan bagaimana operasi-operasi semacam ini telah dilaksanakan dengan berbagai cara sepanjang sejarah sosiologi. Tesis saya ini masih belum merupakan sebuah “hipotesis” mengingat sangat sulit untuk memperagakannya secara empiris. Saya menganggap bahwa proyek stabilisasi realitas kurang berpeluang untuk dapat berhasil dalam kerangka negara-bangsa karena proyek tersebut terus-menerus terganggu oleh arus yang terkait dengan perkembangan kapitalisme. Aliran ini mengancam upaya-upaya yang bertujuan untuk menyeragamkan realitas dalam suatu wilayah dan populasi. Banyak penelitian, khususnya oleh Gérard Noiriel – yang mengerjakan isu tentang penguatan perbatasan, dokumen-dokumen identitas, dan penyatuan linguistik – menganalisis upaya negara untuk menyeragamkan wilayah dan populasi. Di Prancis, sebuah studi yang luar biasa oleh Jacques Revel, Dominique Julia dan Michel de Certeau berfokus pada topik ini 30 tahun yang lalu. Studi ini mengacu sebagian apa yang disebut Deleuze sebagai pertentangan antara teritori dan arus, semenjak proyek negara-bangsa terus-menerus mengalami destabilisasi oleh arus yang digunakan demi berfungsinya kapitalisme. Dalam konteks sosial di mana novel-novel detektif atau mata-mata lahir, yang paling utama negara-bangsalah yang mampu, dan bertujuan mengkonstruksi realitas.

LC & MJB: *Apakah ini mengharuskan para sosiolog untuk melampaui konteks negara-bangsa untuk menciptakan modalitas baru dari penjumlahan, yang mampu menangkap penciptaan dan destabilisasi kerangka ini?*

LB: Ya, memang. Mengapa saya tertarik pada sejarah novel-novel detektif dalam kaitannya dengan pembentukan negara-bangsa? Mengapa saya dapat melaksanakan hal ini? Saya pikir saya dapat melaksanakan hal ini karena kerangka ini saat ini berada dalam krisis berat. Pada saat yang sama, kita dapat mengamati kerangka ini dari luar, sekalipun sulit untuk menggambarkan sisi luarnya. Dengan satu eksperimen pikiran, setidaknya kita dapat melampaui kerangka nasional dan negara. Saya pikir masalah utama untuk para sosiolog masa kini adalah bahwa arsitektur sosiologi, khususnya di Prancis, walaupun bukan hanya di Prancis, tergantung pada negara-bangsa yang didirikan pada akhir abad kesembilan belas. Itulah sebabnya mengapa kita memiliki sosiologi Inggris, sosiologi Jerman, sosiologi Prancis... Mengingat bahwa kita saat ini mengalami penurunan yang signifikan dan transformasi pada kerangka berpikir ini, banyak alat-alat analisis sosiologi tidak lagi bekerja dan harus dikonstruksikan kembali untuk memahami cara-cara di mana kerangka berpikir baru tentang stabilisasi realitas dan kritik muncul terlepas dari batas-batas nasional. Bagi anda yang memasuki bidang keahlian sosiologis ini, itulah yang anda harus laksanakan! ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Luc Boltanski <boltanski@ehess.fr>, Laura Chartain <laurachartain@gmail.com> dan Marine Jeanne Boisson <boisson.marine@hotmail.fr>

> Lembaga Luar Biasa di Afrika Selatan

Wawancara dengan Sarah Mosoetsa



| Sarah Mosoetsa.

Universitas-universitas Afrika Selatan telah mengalami tantangan berat dalam mengatasi warisan apartheid. Kami menyaksikan betapa mendalam dan kompleksnya warisan tersebut dalam gerakan mahasiswa belakangan ini – #RhodesMustFall dan #FeesMustFall – tetapi hal-hal tersebut seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari berbagai eksperimen baru yang terjadi pada pendidikan tinggi Afrika Selatan. Di antaranya, Lembaga Nasional Ilmu-ilmu Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial (*National Institute of the Humanities and Social Sciences*, NIHSS) yang secara khusus dikenal karena keberhasilannya. Dalam jangkauan dan ambisinya, NIHSS tergolong unik di seluruh Afrika. Dengan dibiayai oleh Departemen Pelatihan dan Pendidikan Tinggi (*Department of Higher Education and Training*), Lembaga ini telah sibuk membina generasi penerus dosen universitas dengan mensponsori ratusan mahasiswa program doktor (PhD), menyebarluaskan beasiswa penting kepada masyarakat lebih luas, dan mempromosikan dialog mengenai masa lalu dan masa depan Afrika Selatan. Lembaga ini dipimpin dan terinspirasi **Sarah Mosoetsa**, seorang Profesor Sosiologi di Universitas Witwatersrand. Beliau adalah penulis *Eating from One Pot* (2012) yang dipuji secara luas – suatu uraian mengenai strategi kelangsungan hidup keluarga dalam menghadapi penutupan pabrik. Di sini, beliau diwawancarai **Michelle Williams**, rekannya di Universitas Witwatersrand, mengenai tantangan dan pencapaian NIHSS.

MW: Ceritakan kepada kami mengenai asal-usul NIHSS.

SM: Izinkan saya memulai dengan konteks sejarahnya. Pada tahun 2010 saya diajak oleh Profesor Ari Sitas dan Dr. Bonginkosi Nzimande, Menteri Departemen Pendidikan Tinggi dan Pelatihan (DHET), untuk menjadi bagian dari suatu tim kerja beranggota dua orang untuk meneliti keadaan ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial (HSS) dalam sistem pendidikan tinggi kita. Menteri prihatin akan ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu Sosial yang dikesampingkan dengan

mengutamakan disiplin-disiplin ilmu STEM [sains, teknologi, teknik, dan matematika]. Ada kesan bahwa ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial tidak berada di depan dalam transformasi nasional. Mandat tim kerja luas dan mencakup misi mencari-fakta berdasarkan pembahasan dengan akademisi di seluruh negara. Profesor Sitas merupakan Direktur, dan saya menjabat sebagai wakilnya.

Sebagai satuan tugas Menteri, kami mengunjungi seluruh universitas dan terlibat dengan para akademisi, dekan, kepala sekolah dan departemen bidang ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial. Apa yang kami peroleh mengungkapkan berbagai hal. Walaupun ilmu-ilmu alam penting, pertumbuhannya terjadi dengan mengorbankan ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial. Menjadi jelaslah bahwa pendidikan tinggi terbelah dua. Tetapi kami juga memperoleh kisah-kisah menakutkan mengenai keberhasilan dalam bidang ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial.

MW: Jadi ini merupakan asal-usul Lembaga?

SM: Ya. Satuan tugas menghasilkan suatu laporan, "Pia-gam untuk Ilmu-ilmu Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial" (*Char-ter for Humanities and Social Sciences*), yang menjabarkan tantangan, dan yang terpenting bagaimana ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial dapat dipacu kembali dan di-beri semangat baru. Piagam merekomendasikan pendirian Lembaga Nasional Ilmu-ilmu Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial (*Institute of the Humanities and Social Sciences*, NIHSS). Menteri mengadopsi Piagam, dan kami segera bekerja untuk pembentukannya, yang secara formal ditetapkan pada bulan Desember 2013. Setelah diangkatnya Dewan saya diminta menjabat sebagai Wakil Kepala Eksekutif (CEO) pada bulan Mei 2014. Dengan demikian, bersama Dewan saya mulai merencanakan Lembaga ini, menentukan program intinya dan selanjutnya.

MW: Setahu saya NIHSS memiliki berbagai program. Dapatkah anda menceriterakannya?

SM: Sebenarnya terdapat tujuh program utama. Saya mulai penjelasan saya dengan Beasiswa Program Doktor (*Doctoral Scholarship Program*), yang merupakan inti dari Lembaga. Tiap tahun kami memberikan 150 beasiswa tiga-tahun untuk mahasiswa warga negara Afrika Selatan yang terdaftar untuk program doktor. Dalam memberikan beasiswa, kami bekerjasama erat dengan para dekan ilmu-ilmu budaya di seluruh universitas publik Afrika Selatan. Para dekan membuat rekomendasi beasiswa dengan menyediakan kepada kami daftar mahasiswa yang mereka inginkan untuk dibiayai (berdasarkan proses hukum internalnya masing-masing), dan, dengan menggunakan kriterianya sendiri, NIHSS membiayai mahasiswa dari daftar para dekan. Prosesnya transparan, dimulai dengan suatu pengumuman tiap tahun kepada mahasiswa semua universitas untuk mengajukan usulan. Penerimaannya orang Afrika Selatan Kulit Hitam 80% dan perempuan 60%. Pada akhir tahun 2016 telah diberikan 451 beasiswa program doktor. Sebagai tambahan, terdapat 111 beasiswa untuk mahasiswa warga negara non-Afrika Selatan dari benua Afrika.

MW: Itu menarik. Jadi anda juga membiayai mahasiswa dari bagian lain dari Afrika?

SM: Ya, kami memiliki suatu program khusus *African Pathways Programme* (APP), berdasarkan pengakuan bahwa Afrika Selatan menerima banyak mahasiswa program doktor lintas benua ini. Melalui APP kami tiap tahun menawarkan 37 beasiswa tiga tahun. Idenya adalah menengok ke sisi lain dari benua kita untuk mendapatkan inspirasi, sambil bekerjasama untuk menumbuhkan dan memberikan energi kepada NIHSS. Kami secara spesifik ingin bergerak melampaui warisan-warisan sejarah dan mempromosikan lebih banyak kolaborasi dengan para mitra sebetulnya.

MW: Dapatkah anda ceriterakan lebih banyak mengenai kolaborasi ini?

SM: Sebagai suatu Lembaga yang muda, kami perlu bekerja dengan entitas lain di benua ini, di mana sebagian besar belum pernah bereksperimen dengan suatu lembaga seperti NIHSS. Jadi kami mengidentifikasi *Council for the Development of Social Science Research in Africa* (CODESRIA) sebagai mitra untuk membantu memilih mahasiswa dan untuk mengembangkan kerja kolaboratif di benua ini. Kemitraan ini berjalan dengan baik.

NIHSS juga memprakarsai *African Pathways Mobility*. Ini terinspirasi oleh model *European Erasmus Mundus*, tetapi dengan gaya Afrika Selatan. Inisiatif ini mendorong dosen dan mahasiswa untuk menjelajah benua dalam rangka menemukan ide dan wilayah penelitian baru di benua tersebut. Kami membiayai perjalanan penelitiannya untuk membantu menjalin kontak baru, membentuk jaringan penelitian, maupun untuk mengejar kerjasama pendidikan dan penelitian.

MW: Kembali ke Afrika Selatan: apakah ada masalah dalam memperoleh sedemikian banyak mahasiswa program doktor?

SM: Itu pertanyaan yang bagus. Memang, untuk dua tahun pertama kami (2013-5), kami harus menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang akan dibiayai dan kami dapat benar-benar memasukkan mereka ke dalam sistem pembiayaan. Sekarang fokus kami adalah bagaimana untuk menjamin kualitas para mahasiswa yang kami sponsori dan mereka benar-benar meraih gelarnya. Di Afrika Selatan kami memiliki tingkat gagal kuliah yang mirip dengan program mahasiswa internasional, di mana hanya sekitar 50% memperoleh gelar doktor. Oleh sebab itu kami mengembangkan *Mentorship Program* untuk mencoba memastikan tingkat kelulusan yang lebih baik.

MW: Kedengarannya sangat penting; apakah anda dapat menceriterakan lebih banyak mengenai program mentorship ini?

SM: Duapuluh satu orang profesor aktif dan pensiun telah ditunjuk untuk bekerja dengan mahasiswa di berbagai provinsi. Sebagai contoh, di Cape Barat kami telah membentuk suatu sekolah doktor regional dengan dua

orang mentor. Para mentor ini berhubungan secara rutin dengan mahasiswa, menyediakan bimbingan dan suasana komunitas. Mereka menawarkan lokakarya yang luas dan menyeluruh dan mencakup tema metodologi, teori, dan penulisan. Mentor merupakan jangkar dan mereka berbagi pengalaman yang luas, tetapi mahasiswa juga saling belajar. Kami pandang belajar dari rekan sebagai hal yang vital. Menjalani program doktor merupakan suatu proses penuh kesendirian, sehingga program ini membantu menciptakan kelompok dan perasaan solidaritas di antara para mahasiswa. Para mentor sangat bermurah hati dan telah berbuat banyak untuk membantu proses transformasi di universitas kami. Kami telah berhasil memperoleh keterampilan dan pengalaman dari para Profesor Emeritus, sehingga dengan jalan itu kami juga memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari proses transformasi ini.

MW: Apakah NIHSS mendorong penelitian-penelitian di samping memberi dukungan kepada mahasiswa program doktor?

SM: Ya, benar, kami memiliki apa yang kami namakan *Catalytic Research Program* yang membiayai penelitian inovatif dan mutakhir, mendorong para ilmuwan untuk bergerak melampaui permasalahan-permasalahan/proyek-proyek penelitian lama yang sama dan menjajaki cara berpikir yang baru, metodologi baru dan jaringan baru. Proyek-proyek sejenis itu mungkin tidak biasa menerima pembiayaan dari penyandang dana tradisional, sedangkan NIHSS mendukung penelitian dengan perspektif baru (*outside the box*). Kami juga mengetahui bahwa ilmuwan di bidang ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu Sosial menulis buku, tetapi penyandang dana arus utama lebih memilih proyek jurnal. Melalui program-program katalis kami ini, kami juga mendukung penelitian oleh mahasiswa program *Honors* [setara sarjana] dan *Master*.

MW: Penelitian yang dilaksanakan “outside the box” mungkin dapat mengalami kesulitan dalam mencari penerbit. Apakah anda mampu mengatasi hal ini juga?

SM: Seperti yang sudah saya katakan, kami membiayai, memprakarsai dan bekerjasama dalam proyek yang tidak hanya mengenai penelitian dan beasiswa doktor. Kami sadar bahwa beberapa hasil karya yang baik tidak diterbitkan karena penerbit menganggap hasil karya tersebut sangat baik, namun “tidak layak secara finansial.” Lembaga tidak memberitahu penerbit tentang apa yang harus diterbitkan, tetapi kami mendukung penerbitan naskah yang sehaluan dengan mandat kami. Ini masih harus melewati berbagai proses telaah mitra bestari penerbit yang ketat, tetapi kami mensubsidi biaya penerbitan baik dengan jaminan untuk membeli sejumlah bukunya ataupun menyumbang secara langsung dengan membiayai proses produksi. Kami juga membiayai publikasi yang berasal dari konferensi.

Salah satu inisiatif kami yang paling saya banggakan adalah penghargaan buku dan kreatifitas nasional untuk ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu Sosial, yang menyelenggarakan ajang penghargaan pertamanya pada bulan Maret 2016. Kami

telah memberikan enam penghargaan untuk berbagai jenis karya: buku non-fiksi dan fiksi, antologi (*edited volumes*), media digital maupun seni yang terbaik. Penghargaan hanya terbuka untuk ilmuwan yang berbasis universitas-universitas Afrika Selatan. Penghargaan pertama adalah untuk buku-buku yang diterbitkan pada tahun 2013 dan 2014 dan kami kewalahan dengan banyaknya naskah yang diajukan, memperlihatkan bahwa ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial kami benar-benar berkembang dengan baik. Kami akan adakan rangkaian ajang penghargaan lagi pada bulan Maret 2017.

MW: Afrika Selatan memiliki sejarah panjang keterlibatan akademisi dalam kegiatan publik. Apakah anda memiliki rencana untuk mendorong para ilmuwan untuk membawa ide dan penelitian mereka ke ruang publik?

SM: Sebenarnya, kami memiliki *Humanities Hub Program*, yang mensponsori penelitian di luar lingkup akademik normal dan menumbuhkan beberapa tempat yang tidak konvensional untuk menghasilkan ilmu. Kami sedang mengarahkannya di Liliesleaf Farm, yang kaya akan sejarah, karena pernah menjadi tempat gerakan kemerdekaan di bawah tanah pada tahun 1960-an dan di mana para Rivonia Trialists [Nelson Mandela dan perjuang kemerdekaan lain] ditangkap. Merupakan suatu realita menyedihkan bahwa banyak akademisi dan mahasiswa tidak tahu mengenai tempat ini. Proyek ini mengubah situs warisan seperti ini menjadi gudang ilmu dan cara berpikir yang berbeda mengenai peristiwa-peristiwa sejarah. Sebagai bagian dari hal ini, Liliesleaf Farm menyelenggarakan suatu kolokium yang dipusatkan di Piagam Kemerdekaan (*Freedom Charter*), dengan menawarkan suatu platform untuk sudut pandang berbeda mengenai sejarah dan mempromosikan percakapan di antara akademisi, praktisi, dan lain-lain. Seperti yang dikatakan orang, kita tahu dari gerakan kemerdekaan bahwa ide hebat dapat datang dari keterlibatan akademisi dengan kaum intelektual awam.

MW: Dapatkah anda memberikan kami beberapa contoh mengenai penjelajahan ke ranah publik ini?

SM: “Pusat kegiatan ilmu-ilmu budaya” kami bertujuan membuat anak sekolah tertarik pada ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial. Sebagai contoh, anak sekolah menengah atas diantar dengan bis ke Liliesleaf Farm untuk memperlihatkan kepada mereka sejarah yang diperagakan di sana. Ini merupakan suatu cara baru untuk mengajarkan dan menunjukkan sejarah kami kepada mahasiswa. Tetapi tidak semua orang dapat datang ke Liliesleaf Farm, sehingga kami membentuk suatu pameran bergerak yang membawa “mini Liliesleaf” ke tempat lain seperti Universitas Afrika Selatan, Universitas Venda, dan Universitas Limpopo.

Ini merupakan cara baru dalam menceritakan ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial kepada kami sendiri maupun kepada seluruh dunia. Cara ini memungkinkan berbagai dialog berbeda seputar sejarah, tentang kami sendiri, dan tentang Piagam Kemerdekaan. Kami mengembangkan

suatu tabel Piagam Kemerdekaan dengan sebuah kotak saran. Kepada khalayak kami menanyakan dua hal: i) Seandainya anda menulis ulang Piagam Kemerdekaan, apa yang akan anda cakup? Dan ii) Ayat mana dalam Piagam Kemerdekaan yang anda paling sukai? Orang telah menulis banyak hal yang menakjubkan. Dan banyak isu yang akan muncul, seperti isu seputar pengangguran, kemiskinan, dan seterusnya. *Lilliesleaf* merupakan suatu proyek perintis dan kami berencana untuk menyelenggarakan “Pusat kegiatan ilmu-ilmu budaya” serupa di tempat-tempat lain.

MW: Apakah Lembaga anda memiliki program internasional?

SM: Melalui jaringan Selatan-Selatan kami, kami telah memprakarsai dan sedang membiayai suatu program penelitian India-Afrika Selatan dengan bermitra dengan *Indian Council for Social Sciences Research* (ICSSR). Kami sedang menjajaki kemitraan penelitian serupa dengan Brasil dan negara-negara lain.

Kami juga mengkoordinasikan wadah pemikir (*think tank*) Afrika Selatan untuk BRICS – asosiasi lima perekonomian berkembang utama: Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan. Terdapat beberapa divisi berbeda – bisnis, akademis, masyarakat sipil – dan kami mengatur divisi akademis, yang mencakup mengkoordinasi forum akademis dengan lima negara, diikuti *BRICS Council and Summit* tiap tahun. Tahun ini forum akademis diselenggarakan di Tiongkok dan pada tahun 2018 Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah. Inisiatif ini berfokus pada pekerjaan kebijakan dan menasehati pemerintah. Tema utama untuk forum akademis beragam (contohnya jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, energi) dan ditentukan oleh negara penyelenggara. Forum-forum menginformasikan ke BRICS summit dan menyediakan saran kebijakan kepada para kepala negara dari kelima negara tersebut. Kami melihat ini sebagai suatu area penting yang menciptakan tatap muka dekat antara akademisi dan pembuatan kebijakan.

MW: Saya anggap hal yang menakjubkan bahwa anda telah mencapai begitu banyak dalam waktu yang singkat ini. Apa yang telah menjadi tantangan terbesar anda?

SM: Saya pikir kami telah berjalan jauh. Lembaga ini baru berusia tiga tahun dan telah mencapai banyak sekali. Seluruh Lembaga ini dibiayai penuh oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan (DHET). Namun bekerja dalam suatu departemen pemerintahan merupakan suatu tantangan sangat besar. Sepanjang perjalanan ini kami mengandalkan para pemain kunci dalam DHET yang menggerakkan segala sesuatunya melalui birokrasi. Tanpa dukungan mereka kami tidak akan dapat meraih apapun. Hal tersebut juga merupakan suatu proses yang sangat kolektif, dengan bekerja secara erat dengan Dewan NIHSS.

Awalnya kami menghadapi perlawanan dari beberapa akademisi dan universitas, yang takut bahwa kami akan menggantikan badan-badan yang sudah ada, mengalihkan dana dari universitas, dan itu akan memberikan kepada

Menteri Pendidikan Tinggi kekuasaan atas ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial. Seluruh kekhawatiran ini diakui dan ditindaklanjuti, dan banyak di antara mereka yang pada awalnya mengkritik kami kini menjadi pendukung terbesar kami. NIHSS merupakan suatu badan hukum yang bertanggung jawab pada suatu dewan yang mandiri. Kami telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa Lembaga tidak akan bersaing dengan badan-badan yang ada, namun lebih memilih untuk melengkapi hasil kerja mereka.

Beberapa di antara tantangan sehari-hari terkait dengan berfungsinya program kami semata-mata. Kami masih menyusun sistem internal. Sebagai contoh, kami bereksperimen dengan suatu aplikasi baru untuk program bimbingan (*mentorship*) untuk memfasilitasi komunikasi di antara pembimbing (*mentor*) dan mahasiswa. Kami telah belajar banyak sebagai suatu organisasi yang muda. Saya pikir diperlukan tiga hingga lima tahun untuk benar-benar menata dan memantapkan sistem-sistem. Kami senang dengan apa yang telah kami capai.

MW: Apa masa depan NIHSS?

SM: Saya kira menakjubkan bahwa dalam jangka waktu yang sedemikian singkat kami telah berhasil menjadikan NIHSS sesuatu yang nyata. Menteri telah memegang peranan penting dalam hal ini, tetapi ia bukan satu-satunya. Dukungan Menteri memungkinkan Lembaga untuk berkembang. Ia benar-benar membaca dokumen-dokumen kami, mengikutsertakan kami, menantang, dan mendukung kami. Ini merupakan anugerah besar bagi NIHSS. Beberapa bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Menteri tersebut tidak ada lagi. Di mana-mana politik adalah cair dan ini memprihatinkan, tetapi kami sedang bekerja keras untuk mandiri dan membuktikan nilai kami yang berkesinambungan dengan jalan bekerja secara sangat baik. Kami telah mengamankan pembiayaan sepanjang 2019/20. Kini kami berharap dapat meluluskan minimal 300 mahasiswa doktor, menyelenggarakan minimal empat ajang penghargaan, dan secara finansial mendukung publikasi dari minimal 40 buku. Jika kesemua ini tercapai, maka kami telah menyelesaikan tugas kami. Dalam kurun waktu sedemikian singkat kami akan berbuat lebih banyak daripada badan lain manapun.

Saya merasa senang, berendah hati, dan bersemangat mengingat bagaimana ilmu-ilmu budaya dan ilmu-ilmu sosial di Afrika Selatan telah merangkul Lembaga kami. Saya mendapatkan kejutan yang menyenangkan dengan adanya tanggapan para akademisi terhadap banyaknya permintaan untuk menelaah usulan, berperan sebagai juri, menjadi pembimbing untuk mahasiswa doktor, dan seterusnya. Belum ada seorangpun yang pernah mengecewakan kami. Komunitas akademis memandang kami sebagai suatu aset utama. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Sarah Mosoetsa <mosoetsa@nihss.ac.za> dan Michelle Williams <Michelle.Williams@wits.ac.za>

> Representasi Perempuan Amerika-Afrika

Wawancara dengan Patricia Hill Collins



| Patricia Hill Collins.

Patricia Hill Collins adalah seorang Profesor Guru Besar Terkemuka (*Distinguished Professor*) Sosiologi di Universitas Maryland dan mantan Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika. Sebagai seorang ahli teori terkemuka di Amerika Serikat, beliau terkenal karena mengembangkan ide-ide yang terkait dengan “penindasan berlapis” (*multiple oppressions*), “interseksionalitas” (*intersectionality*), dan “orang luar di dalam” (*outsider within*), untuk kali pertama dalam buku klasiknya *Black Feminist Thought* (1990) dan kemudian dalam *Fighting Words* (1998) dan *Black Sexual Politics* (2006). Berikut kami sajikan inti sari dari wawancara yang lebih panjang yang dilakukan oleh **Labinot Kunushevc**, mahasiswa program MA di Universitas Prishtina, Kosovo.

LK: Dari perspektif anda, apa metodologi teoritis dan empiris yang paling tepat untuk penelitian studi kesenjangan sosial?

PHC: Bagi saya, saya mulai dengan studi mengenai “wacana dominan”, dan wacana dominan tersebut di Barat terdiri dari konstelasi proyek-proyek pengetahuan yang bersama-sama membentuk perangkat ide dan praktek yang hegemonik. Wacana dominan ini menetapkan persyaratan perdebatan - apa yang dianggap pertanyaan penting, apa yang dianggap sebagai bukti, serta apa yang dapat diabaikan sebagai hal sekunder. Di Amerika Serikat, wacana dominan dibentuk oleh interseksi dari ras, kelas, gender, seksualitas, dan bangsa sebagai sistem kekuasaan. Dalam pekerjaan saya, saya telah meneliti bagaimana rasisme, seksisme, eksploitasi kelas, dan heteroseksisme beroperasi untuk membentuk pengalaman hidup dari kelompok sosial yang berbeda. Pengalaman

perempuan Kulit Hitam merupakan pintu masuk bagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar dari kekuasaan dan pengetahuan, tapi pengalaman perempuan Amerika-Afrika ini bukan titik akhir.

Dalam pendekatan saya perempuan Amerika-Afrika menghadapi serangkaian masalah sosial yang dibangun di interseksi beberapa sistem kekuasaan. Ambil kekerasan, misalnya. Kekerasan dalam rumah tangga berbasis gender terhadap perempuan Kulit Hitam yang dilakukan oleh pacar-pacar mereka, suami, dan ayah terjadi dalam konteks kekerasan ras oleh negara terhadap orang-orang Kulit Hitam yang merupakan bagian dari warisan perbudakan dan diskriminasi ras. Kedua bentuk dari kekerasan menemukan maknanya satu sama lain - mereka saling berhubungan. Pekerjaan saya mengenai feminisme Kulit Hitam meneliti bagaimana intelektual dan aktivis perempuan Kulit Hitam seperti Angela Davis, Juni Jordan, dan Kimberlé Crenshaw,

telah secara konsisten menunjukkan bahwa masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perempuan Kulit Hitam tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan hanya melihat satu sistem penindasan saja. Dengan menggunakan kekhasan pengalaman perempuan Amerika-Afrika, intelektual feminis Kulit Hitam mengemukakan pertanyaan mengenai simultanitas penindasan, yang pada gilirannya membuka area yang kuat bagi pengetahuan dan politik yang kita kenal sekarang sebagai interseksionalitas (*intersectionality*).

Kombinasi sistem kekuasaan yang membentuk wacana dominan suatu masyarakat tertentu mungkin berbeda-beda. Sebagai contoh, sistem kekuasaan yang berkelindan yang saya amati di AS - ras, kelas, gender, seksualitas, dan kewarganegaraan - mencerminkan sejarah khusus dari AS. Saya rasa suatu bangsa yang masih sangat baru seperti bangsa anda sendiri yang baru saja berdiri membawa interseksi yang berbeda, misalnya etnisitas, kelas, dan agama, memiliki arti-penting khusus dalam sejarah Kosovo. Penting untuk diingat bahwa, terlepas dari sejarah yang berbeda yang mencerminkan berbagai konstelasi hubungan kekuasaan, kelompok elit mengontrol baik seluruh wacana dominan maupun pengetahuan yang muncul. Kelompok dapat bervariasi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain, tetapi hubungan kekuasaan dari ketimpangan sosial berarti bahwa tidak semua orang memiliki akses dalam membentuk wacana dominan, meskipun semua orang dalam masyarakat dipengaruhi oleh hal tersebut melalui berbagai cara.

Pertanyaan mengenai mana metodologi teoritis dan empiris yang paling tepat mencerminkan di mana posisi seseorang dalam relasi kuasa produksi pengetahuan secara umum, dan dengan disiplin pengetahuan spesifik yang mana dirimu ingin terlibat. Dalam kasus saya, saya memilih untuk terlibat dalam kajian teoritis, dengan alasan bahwa ketika anda memperhatikan landasan epistemologis dari pengetahuan, anda lebih dekat ke jantung kekuasaan. Kajian teoritis saya menyelidiki berbagai dimensi dari interseksi relasi kuasa, dengan perhatian khusus pada bagaimana mereka membentuk pengetahuan. Dalam hal ini, kerangka interseksionalitas telah menjadi alat analisis yang berguna untuk membahas kesenjangan sosial, baik di dalam wacana akademis maupun dalam politik.

LK: Apa peran representasi media dalam penindasan dan pembebasan perempuan, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi partisipasi perempuan di ruang publik dan politik?

PHC: Semua perempuan mempunyai pengalaman tentang representasi media yang menyajikan naskah sosial tentang bagaimana menjadi feminin. Namun karena masyarakat berbeda secara dramatis, gambaran mengenai wanita yang ideal juga berbeda-beda. Di Amerika Serikat dan masyarakat multikultural yang serupa, representasi media mengenai perempuan berbeda tergantung pada

berbagai kombinasi ras, identitas gender, etnis, kelas dan status kewarganegaraan. Perempuan heteroseksual kulit putih kelas menengah yang memegang kewarganegaraan AS diangkat sebagai tipe ideal bagi perempuan dari kelompok lain. Ini adalah suatu ideal, suatu representasi, suatu konstruksi sosial, bukan kategori orang yang sebenarnya. Secara tradisional, ideal feminin ini disajikan dalam citra mengenai ibu yang tinggal di rumah, tetapi baru-baru ini citra tersebut telah diperbarui dengan menyertakan perempuan pekerja yang mempunyai kekuasaan besar dalam pekerjaannya. Dalam suatu masyarakat multikultural, jika kelompok perempuan lain semakin mendekati ideal tersebut, semakin baik penilaian terhadap mereka.

Dalam *Black Feminist Thought*, saya mengkaji bagaimana perempuan Amerika-Afrika menghadapi empat stereotipe utama: (1) keledai (*the mule*), perempuan yang bekerja seperti seekor binatang tanpa mengeluh; (2) *jezebel* [seorang ratu di kisah dalam Kitab Injil], perempuan sangat seksual yang sering digambarkan sebagai pelacur; (3) *mammy* [pengasuh Kulit Hitam di AS bagian Selatan masa lalu], perempuan pekerja rumah tangga Kulit Hitam yang kesetiaannya pada majikannya tanpa cela; dan (4) *The Black Lady*, wanita Kulit Hitam berpendidikan yang mengorbankan kehidupan keluarganya demi karir. Tetapi representasi tersebut tidak sekedar representasi yang halus, tetapi merupakan anakronisme praktek rasisme, seksisme, dan eksploitasi kelas di masa lalu. Malah, hal-hal tersebut penggambaran yang mengontrol kesan karena mereka menyajikan naskah sosial tentang bagaimana orang diharapkan untuk memandang dan memperlakukan perempuan Kulit Hitam. Lebih penting lagi, representasi tersebut adalah naskah sosial terhadap mana perempuan Kulit Hitam diharapkan bisa menginternalisasikannya.

Feminisme dan gerakan hak-hak perempuan yang lebih luas ditujukan untuk mematahkan baik representasi ini maupun relasi kuasa yang diwakilinya. Ketika perempuan menolak representasi diri mereka sebagai ibu rumah tangga yang menganggur atau sebagai keledai yang menerima upah rendah dan tidak memperoleh jaminan kerja, atau sebagai pembantu yang setia bagi majikan laki-laki dan perempuan lintas ras dan etnis, mereka memasuki ranah publik dengan kesadaran yang sangat berubah. Dalam hal ini, ide-ide dan aktivisme sangat erat berhubungan. Mengubah representasi dapat mengubah perilaku, dan perubahan perilaku pada gilirannya menumbuhkan anggapan yang berbeda mengenai perempuan di ranah publik. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Patricia Hill Collins <collinph@umd.edu> dan Labinot Kunushevci <labinotkunushevci@gmail.com>

> Setelah Lee Kuan Yew

oleh **Vineeta Sinha**, Universitas Nasional Singapura, Wakil Presiden ISA bidang Publikasi, 2014 - 2018



Para jemaah Tionghoa mempersembahkan dupa di Kelenteng Guanyin yang bersebelahan dengan Pura Sri Krishnan. Foto oleh Daniel Goh.

Sosok menjulang mending Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang pertama sesudah kemerdekaan, tampaknya telah sungguh-sungguh menentukan hakikat dan identitas negara pulau tersebut. Gaya pemerintahan Singapura yang diidentikkan dengan, dan sesungguhnya merupakan kepanjangan sosok Lee Kuan Yew, diberi julukan “otoriterisme pragmatis,” “otoriterisme lunak,” “despotisme luhur,” dan bahkan “kediktatoran budiman.” Narasi pokok tentang negara ini menjunjung prinsip meritokrasi, multikulturalisme dan kedaulatan hukum yang telah melahirkan pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien, modernisasi, pembangunan ekonomi dan kemakmuran, serta salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Penerapan suatu ideologi yang mengakui keragaman sosio-budaya dalam masyarakatnya dan memberi tempat “kesetaraan” bagi semua (lihat esai Noorman Abdullah “Setelah Multirasialisme” dalam edisi ini), narasi ini tidak menekankan pada kesetaraan dalam jumlah melainkan pada kesetaraan dalam hal kesempatan, dengan menolak pelembagaan diskriminasi etnis melalui pemberian hak istimewa yang dianggap patut. Tetapi credo yang kuat ini sangat membatasi, bahkan hampir tidak memungkinkan artikulasi wacana mengenai perbedaan ras dan rasisme; credo ini menutupi politik dan kontradiksi yang

terkandung dalam suatu meritokrasi yang terukur (lihat esai Youyenn Teo “Setelah Meritokrasi” dalam edisi ini).

Gaya politik Singapura dalam manajemen dan pemerintahan telah mengutamakan perencanaan, efisiensi, kontrol dan regulasi. Berfungsinya kehidupan sehari-hari masyarakat Singapura dibingkai oleh suatu birokrasi yang dipandang bersih dari korupsi dan segala praktik tidak jujur, serta berfungsi secara efisien, malah mungkin terlalu efisien. Sebagai warisan Inggris, “infrastruktur” ini telah diasah dan diproduksi ulang secara cermat oleh para pemimpin Singapura untuk terus memperkuat ketatan yang cermat pada pengaturan perilaku melalui peraturan – suatu hal yang akan mengesankan dan mengkhawatirkan bagi Max Weber. Prinsip utamanya yang menekankan pada sentralisasi tata kelola dan interaksi yang melekat dengan semua ranah masyarakat membutuhkan suatu aparat negara yang ekspansif dengan dukungan jejaring organisasi birokratis. Justru melalui lembaga-lembaga perantara inilah negara berusaha menegakkan kebijakan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warganya di bawah cakupan payung ideologi otoriter yang sekaligus pragmatis. Ketika menggambarkan “budaya kontrol” Singapura, Carl Trocki berpendapat bahwa negara pasca-kolonial ini benar-benar menjalankan tingkatan wewenang yang lebih besar dan “mengambil tang-

gungjawab terhadap [...] pengelolaan dan pengawasan masyarakat secara total.” Chua Beng Huat dan Kwok Kian Woon juga mencatat bahwa di Singapura pascakemerdekaan, “perluasan intervensi negara dan [...] suatu pemusatan kekuasaan dalam lembaga negara” telah semakin mengurangi otonomi dalam berbagai ruang kehidupan sehari-hari.

Baik wacana akademik maupun obrolan sehari-hari secara sangat baik dan tepat menghubungkan Singapura dengan Lee Kuan Yew dan ciri politik otoriter khasnya yang tidak kenal kompromi yang melekat pada sosoknya. Warga Singapura secara khas digambarkan sebagai konservatif, penakut, patuh dan pasif. Meskipun demikian, masyarakat Singapura sudah lama kritis terhadap pendekatan pemerintahan dari atas ke bawah (*top-down*) yang “memakai palu godam untuk memecahkan buah kenari” – suatu bagian yang utuh namun kadang-kadang membosankan dalam wacana publik di Singapura.

Dan seperti apakah hubungan struktur politik dengan ilmu sosial? Sosiologi Singapura pun sudah lama dilihat secara terus-menerus melalui kacamata Lee Kuan Yew. Para pemimpin Singapura pasca-kolonial memprioritaskan pertumbuhan ekonomi – mencerminkan kebutuhan suatu negara yang baru merdeka di mana pembangunan ekonomi dan perubahan sosial secara terukur nampaknya mendesak untuk dilakukan. Penelitian ilmu sosial (sebagian besar dibiayai negara) diharapkan bersifat “relevan,” ikut mendukung proyek pembangunan bangsa atau setidaknya menyumbang secara langsung pada proses modernisasi. Dari tahun 1970 hingga masa 1990an, produksi ilmu pengetahuan sosial ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan-perubahan cepat pada bidang sosio-budaya, ekonomi dan politik Singapura yang mencerminkan prioritas suatu negara-bang-

sa yang harus menata penduduk yang beragam etnis dan agamanya.

Namun akhir-akhir ini keterkaitan antara para ilmuwan sosial berbasis universitas dengan kepentingan nasional – yang sebenarnya tidak pernah mutlak – telah menjadi lebih renggang. Para sosiolog Singapura telah mempersoalkan narasi resmi negara mengenai multikulturalisme, meritokrasi, keluarga, neoliberalisme, globalisasi, sejarah Singapura, keragaman agama dan kerukunan antar umat, tiadanya kemiskinan dan ketimpangan sosial, dan sebagainya. Dalam suatu perkembangan lain, negara Singapura sekarang sedang mengembangkan kemampuan melakukan penelitian secara mandiri di dalam berbagai kementerian, suatu langkah yang dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap penelitian yang dilakukan universitas.

Tidaklah mengherankan jika kematian Lee Kuan Yew pada tahun 2015 memicu reaksi mendalam dari banyak warga Singapura, ketika bangsa itu berduka dengan meninggalnya sang arsitek dan nahkoda negara Singapura modern. Menariknya, kesempatan itu sekaligus merupakan suatu momentum yang bersifat membebaskan, semacam perasaan lepas dari larangan dan peraturan yang berlebihan, dan gerakan menuju kebebasan, termasuk kebebasan politik.

Akan tetapi suasana yang nyaris bernada euforia ini perlu diimbangi dengan sejumlah imajinasi sosiologis. Sebagai seorang ahli etnografi yang bekerja di Singapura, penelitian saya tentang praktek agama-agama berakar pada keutamaan dan pentingnya kehidupan sehari-hari. Mengingat organisasi kehidupan sosial dan politik masyarakat yang lebih luas, ruang-ruang sakral di pulau ini juga berakar pula pada suatu mentalitas yang sangat rasional, yang dibingkai dalam kerangka birokratis, administratif dan legislatif. Kekhasan lanskap kehidupan beragama di Singapura, khususnya budaya birokratisnya dan dampaknya bagi ekspresi religiusitas, perlu penjelasan lebih lanjut (lihat esai Francis Lim, “*Sesudah Sekularisme*” dalam edisi ini).

Bahwa negara Singapura bersifat intervensionis merupakan titik awal penelitian saya, yang memetakan “kekacauan” lanskap keagamaan Singapura, mengungkap keberadaan “kuil-kuil di hutan” (*jungle temples*)

(tempat-tempat suci yang terletak di ruang tersembunyi untuk menghindari pengawasan penguasa) serta alam perayaan keagamaan dan tempat-tempat ibadah – mengungkapkan saling berjalannya kehidupan keagamaan sehari-hari warga biasa Singapura yang beragama Hindu, Tao, Buddha, dan Katolik. Ketika para pemeluk agama menciptakan wilayah-wilayah dan kesadaran sakral dalam suasana yang serba terbatas, wajah Singapura perkotaan memperlihatkan “kericuhan” dan “ketidakteraturan” alam kehidupan beragamanya: prosesi keagamaan bahkan pernah dilaksanakan di gedung olahraga sementara perayaan keagamaan dilakukan di kolam renang. “Pengabaian” terhadap batas-batas antara “sakral/sekuler” dan “pribadi/publik” yang telah ditetapkan secara hati-hati itu menjadi ciri kehidupan beragama di Singapura selama masa pemerintahan Lee Kuan Yew yang otoriter. Cara pandang alternatif mengenai ruang keagamaan dan keterkaitannya dengan politik ini menantang pandangan yang dominan mengenai Singapura sebagai kota yang tersanitasi, steril dan terlalu diatur.

Kalau begitu apa yang bisa dikatakan mengenai kemampuan sehari-hari untuk tawar-menawar dengan struktur kekuasaan yang resmi? Meskipun berhadapan dengan kehadiran tegas struktur birokratis dan suatu sikap yang intervensionis, suatu hasrat yang kuat untuk melakukan eksperimen keagamaan merupakan kekhasan ranah keagamaan di Singapura. Walaupun intervensi semacam itu mengubah ruang untuk beragama, namun inovasi dan kreativitas keagamaan tidak dihilangkan. Pengaturan terhadap agama tanpa sengaja justru telah membuka ruang-ruang baru bagi kebebasan beragama. Dalam praktiknya, belantara birokrasi yang rumit ini menyisakan ruang untuk tawar-menawar seperti kelihatan ketika para pemeluk agama secara strategis memanfaatkan peraturan untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan sehari-hari.

Etnografi saya tentang lanskap sosio-politik dan keagamaan Singapura yang rumit ini mendorong saya untuk mempersoalkan ciri stereotip sebagai warga tak bersemangat, pasif dan tertindas yang menghadapi suatu pemerintah yang sangat otoriter, terutama dalam masa pemerintahan Lee Kuan Yew. Narasi yang saya sampaikan memang tidak sejalan

dengan kisah yang biasa diceritakan mengenai kehidupan beragama di Singapura, dan bertentangan dengan wacana hegemonis mengenai suatu negara Singapura yang bersifat mengendalikan, yang berfungsi mengatur kehidupan pribadi warga secara berlebihan, sekurangnya membentuk perilaku yang patuh, mudah ditebak, dan, yang terburuk, menghasilkan kelompokan serta ketiadaan inisiatif.

Karena sudut pandang mengenai suatu negara otoriter sudah mapan, wacana akademik (dan pembicaraan sehari-hari) sering diwarnai oleh suatu keyakinan pasti bahwa kisah tentang Singapura sudah sangat dikenal, atau bahwa apapun yang akan disampaikan itu mudah ditebak dan memboreskan. Kajian mengenai Singapura secara umum masih harus terus berhadapan dengan sudut pandang mengenai kehidupan sosial budaya dan politik Singapura yang disampaikan melalui suatu pandangan politik yang sudah kadaluwarsa mengenai Singapura. Ketika menyampaikan pandangan alternatif mengenai masyarakat Singapura, saya kadang-kadang dipahami sebagai seorang pembela negara otoriter atau sebagai seorang naif yang senang dengan penggambaran tema kemenangan-kemenangan sehari-hari yang bersifat “mikro” oleh warganegara/pelaku non-pemerintah (*non-actor*) yang tertindas, tanpa mempertimbangkan bahwa aparat politik makro tetaplah memegang hegemoni.

Jadi, sosiologi Singapura sangat sibuk. Ia tidak semata-mata harus menghasilkan kajian alternatif terhadap wacana dan kisah resmi dan hegemonis mengenai masyarakat Singapura, tetapi juga harus terus-menerus menanggapi tafsir-tafsir sinis tentang masyarakat Singapura maupun kajian sosiologisnya. Pergeseran dari wacana yang klise dan mudah ditebak semacam itu ke kajian alternatif mengenai kehidupan sosial dan politik Singapura perlu diterima sebagai suatu tantangan dan sekaligus cita-cita. Struktur sosial tidak dibuat oleh individu; ia juga tidak hilang dalam semalam. Pertanyaan yang sesungguhnya barangkali adalah: apa yang akan terjadi dengan lanskap politik Singapura setelah kekuasaan Perdana Menteri Lee Hsien Loong berakhir? ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Vineeta Sinha <socvsn@nus.edu.sg>

> Setelah Multirasialisme

Oleh **Noorman Abdullah**, Universitas Nasional Singapura, dan anggota Kelompok Tematik ISA mengenai Perasaan dan Masyarakat (TG07)



Patung pedagang Melayu dan India di situs sejarah Telok Ayer di kawasan Chinatown masa kini di Singapura. Foto oleh Daniel Goh.

Pada waktu berbicara dalam rapat umum Hari Nasional pada bulan Agustus 2016, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong membahas hubungan antar ras di Singapura dan himbauan agar ada perwakilan minoritas di jenjang tertinggi jabatan politik. Perwakilan minoritas di sini diartikan secara khusus terkait masalah ras – bukan gender, bukan seksualitas atau kategori sosial lain yang memiliki makna sosial berbeda atau berhimpitan. Menariknya, dahulu di tahun 1989, ayah Lee, mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, menekankan bahwa Singapura belum siap untuk menerima seorang Perdana Menteri yang bukan Tionghoa; hingga akhir tahun 2008, Lee muda menyatakan bahwa suatu perkembangan demikian “dimungkinkan terjadi tetapi tidak dalam waktu dekat” (*The Straits Times*, 9 November 2008). Ironisnya, dua minggu setelah rapat umum tahun 2016 tersebut, harian utama Singapura, *The Strait Times*, mempublikasikan satu halaman penuh berjudul Siapa Yang akan Memimpin Singapura Kelak? (*Who Will Lead Singapore Next?*), dengan menawarkan profil para kandidat potensial untuk menggantikan Lee (4 September 2016) yang kesemuanya menteri etnis Tionghoa yang merupakan mayoritas dalam kabinet.

Pidato-pidato Lee menunjukkan masih bertahannya rasialisasi dalam masyarakat Singapura. Alih-alih diredam, mencolok dan kasat-matanya ras malah digarisbawahi dan diperkuat melalui kebijakan sosial, politik dan budaya, dan tetap menjadi hal yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari di Singapura. Ekspresi hegemonik dalam pengor-

ganisasian kehidupan sosial dan politik berasal dari model multirasialisme Singapura; kategori-kategori “Tionghoa” (*Chinese*), “Melayu” (*Malay*), “India” (*Indian*) dan “Lainnya” (*Others*) – secara resmi disingkat CMIO – menetapkan budaya dan bahasa masing-masing bagi tiap kategori ras

Multirasialisme CMIO dan meritokrasi, yang dibangun di atas jejak peninggalan kolonialisme Britania, merupakan kunci landasan ideologis yang mendefinisikan negara yang pada tahun 1965 secara tidak sengaja terbentuk (*accidental state*) ketika Singapura dilepaskan dari Malaysia – sebuah pelepasan yang merupakan hasil dari sengketa komunal antara Malaysia dan Singapura terkait hak perlindungan atas etnis Tionghoa dan minoritas-minoritas lainnya. Kerangka ini menjadi acuan *nation-building* di era pascakemerdekaan Singapura: dalam upayanya untuk perlindungan dan legitimasi keberlanjutan Singapura sebagai sebuah negara-kota yang kecil, pemerintah telah menekankan pada pemberian dan penjaminan kesetaraan status, perlakuan, pemberian kesempatan, dan hormat kepada kelompok-kelompok etnis dan keagamaan yang berbeda. Keterlibatan dengan ras yang hadir di mana-mana semacam itu diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pendidikan dan bahasa, kelompok swadaya, alokasi perumahan rakyat, pengendalian penduduk, dan representasi politik.

Mengingat bahwa Singapura mengklaim menggunakan pendekatan ras yang nampaknya netral, negara digambarkan sebagai pelindung yang menjaga kesetaraan dan ketidakberpihakan dalam hubungan ras dalam batasan kepentingan nasional. Di saat yang sama, seperangkat kebijakan memperbolehkan negara untuk mereproduksi proporsi ras spesifik dari penduduk. Paradoks dari aritmetika ras ini menjamin dan mempertahankan suatu mayoritas dan dominasi etnis Tionghoa, meskipun ada penekanan pada kesetaraan. Lalu Deputy Perdana Menteri dan kemudian Presiden terpilih, Presiden Ong Teng Cheong, mengklaim bawa preferensi perlakuan kepada kelompok-kelompok tertentu tidak bertentangan dengan apa yang tersurat dalam dan semangat Konstitusi. Faktanya suatu wacana tentang multikulturalisme yang memberikan kesetaraan kepada seluruh budaya secara implisit memperbolehkan beberapa budaya untuk menjadi lebih setara (*more equal*) daripada budaya lain.

Lebih penting lagi, multirasialisme CMIO sebagai cara organisasi sosial wajib untuk mengatur perbedaan budaya, cenderung mengaburkan dan menghapuskan pengertian sosial terkait perbedaan-perbedaan etnis, regional, lingu-

istik, keagamaan, dan budaya dalam kategori-kategori yang dibatasi secara resmi tersebut. Ini juga menanamkan dan memperkuat batas-batas ras melalui pengakuan, perayaan dan involusi perbedaan antara masing-masing kelompok ras dalam CMIO. Ras dan, secara lebih luas, budaya, dianggap sebagai kategori politik dan administratif yang diperlakukan, diklasifikasi, dan diinstitusionalisasikan dalam istilah-istilah yang bersifat esensialis, terikat, dan homogen secara internal.

Selanjutnya, diskusi kritis tentang praktik-praktik budaya sering dibatasi demi kepentingan untuk menjaga toleransi ras dan harmoni. Toleransi dipertahankan dengan menjaga jarak dan mencakup penerimaan hal yang dianggap tidak nyaman. Di lain pihak, minim sekali penekanan pada dialog antarbudaya, saling menghormati, pencarian kebersamaan, dan perhatian multikultur serta keingintahuan yang menjangkau ke pengertian mendalam, pengetahuan, apresiasi, dan penerimaan apa yang berharga dan bernilai dari perbedaan-perbedaan. Hasil yang dicapai ialah suatu harmoni ras yang tak melangkah jauh-jauh dari perbedaan budaya yang dipaparkan dalam kampanye-kampanye resmi.

Namun di saat bersamaan, kemungkinan-kemungkinan alternatif dan imajinasi dalam kehidupan sehari-hari, dan pelibatan yang lebih kompleks dengan ras, perbedaan, dan multikulturalisme di periode pasca-kemerdekaan Singapura menunjukkan adanya banyak sekali potensi untuk bergerak melampaui intervensi-intervensi negara dan insiatif-insiatif *top-down* lainnya. Praktik-praktik antarbudaya dalam hidup sehari-hari ini muncul secara organik, tanpa intervensi, gangguan, dan campur tangan dari luar, dengan melalui proses lintas budaya lintas batas dan batas-batas kelompok yang lebih lentur dan saling menyerap (*permeable*). Sebagai produsen budaya, warga yang terlibat dalam berbagai pertukaran biasa saling menyetujui, bernegosiasi, dan berinteraksi dengan perbedaan dan perubahan budaya.

Kayanya tekstur kehidupan sehari-hari merupakan bukti mengenai praktik budaya yang melawan dan melampaui butiran kategori ras dan budaya yang diakui secara institusional, yang tidak membutuhkan intervensi yang sifatnya *top-down* dari negara. Di bidang keagamaan, negosiasi tentang batas-batas tersebut dimengerti sebagai proses yang mencakup “sinkretisme”, “hibridisasi dan transfigurasi”, dan “mencampurkan dan memasang”. Hinduisme bercampur dengan Taoisme dalam dimensi keyakinan, praktik, ruang, dan obyek-obyek ritual; tempat-tepat ibadah tidak mudah digolongkan sebagai Taois atau Hindu, sedangkan rumahtangga Hindu dapat mencakup representasi Krishna, Murugan, dan Ganesha, bersama Yesus Kristus, Maria, dan Dewi Guan Yin, dan Buddha yang Tertawa di altar-altar mereka. Pencampuran dan pemasangan seperti itu menunjukkan bahwa dalam praktik beragama mereka sehari-hari para penganut secara aktif melakukan seleksi dari berbagai agama berbeda. Ketika berada dalam fase kegamaan spiritual etnis Muslim-Melayu dan Tionghoa mungkin mencari tuntunan praktisi spiritual dari kedua sisi.

Demikian pula, makanan-makanan khas etnis di Singapura – laksa, nasi ayam, rujak, mie goreng, dan lainnya – menunjukkan saling meminjam dan hibridisasi kuliner, meskipun makanan sering kali secara resmi “disalahkategorikan” dengan makanan yang dianggap sebagai “wakil” dari kelompok-kelompok “ras” berbeda dalam CMIO¹.

Dalam ruang bahasa, kemunculan alami dan penggunaan sehari-hari *Singlish* mengganggu peleburan sederhana kategori ras dan bahasa CMIO. Sebagai sebuah bahasa tidak resmi kaum kreol dan *patois* berbasis Bahasa Inggris yang menyerap dialek Tionghoa, Bahasa Melayu, Tamil dan bahasa-bahasa lokal lain, ambivalensi negara terhadap *Singlish* tampak dalam kampanye “Gunakan Bahasa Inggris yang Baik” (*Speak Good English*).

Para sosiolog dan antropolog telah mengkaji ikatan, pertemuan, dan pengalaman yang terjadi pada berbagai perjumpaan di sepanjang Singapura. Hal ini berwujud keagamaan yang hidup sehari-hari, makanan dan budaya makan, bahasa, rasa, film dan pertunjukan. Praktik budaya semacam ini mengganggu batas esensialis dan saling eksklusif yang ditetapkan dalam kategori-kategori ras yang ditegakkan secara resmi. Suatu kajian kritis yang mempertanyakan soal ras, multirasialisme CMIO, dan hak-hak istimewa yang muncul bersamaan dengan kuasa dan dominasi mencerminkan kemungkinan-kemungkinan untuk membayangkan Singapura melampaui wacana dan kontrol (*appropriation*) yang negara-sentris.

Pada waktu ini, Singapura berhadapan dengan kuatnya arus masuk penduduk (*influx*), bersamaan dengan pertautan dengan identitas-identitas kosmopolitan dan aspirasi-aspirasi baru dalam dunia yang semakin timpang. Ketimbang mengejar suatu visi ideal yang utopis tentang harmoni rasial, atau secara liberal sama sekali menghapuskan ras sebagai suatu kategori, para sosiologi dan antropolog seharusnya menghimbau berbagai kelompok dalam masyarakat Singapura untuk melakukan kritik pribadi secara jujur dan reflektif serta sadar terhadap kondisi, batas, dan alternatif dari ras, perbedaan, dan multikulturalisme. Melalui upaya-upaya ini individu dan komunitas mungkin dapat diajak untuk memikirkan, mendebat, berimajinasi, membayangkan, dan mengkonstruksikan identitas-identitas Singapura yang secara khas bermakna yang dimiliki bersama (*shared*) dan juga pada waktu bersamaan berbeda. Visi ini membutuhkan dirajutnya baik pengakuan maupun aksi, baik rasa hormat maupun keraguan, dan konsensus maupun perjuangan untuk menajamkan kewarganegaraan yang semakin memiliki informasi kritis, kreatif dan multikulturalis. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Noorman Abdullah
<socnoorm@nus.edu.sg>

¹ Chua Beng Huat and Ananda Rajah (2001). “Hybridity, Ethnicity and Food in Singapore” pp. 161-197 in David Y.H. Wu and Tan Chee-Beng (eds.) *Changing Chinese Foodways in Asia*, Hong Kong: The Chinese University Press; Low, Kelvin E.Y. (2015). “Tasting Memories, Cooking Heritage: A Sensuous Invitation to Remember” pp. 61-82 in Lily Kong and Vineeta Sinha (eds.) *Food, Foodways and Foodscapes: Culture, Community, and Consumption in Post-Colonial Singapore*, Singapore: World Scientific Publishing.

> Setelah Meritokrasi

Oleh **Youyenn Teo**, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura



Di Singapura masa kini, pusat-pusat “pengayaan” dan “pembelajaran” merupakan suatu pemandangan yang semakin lazim. Foto oleh Youyenn Teo.

Masuklah ke dalam mal manapun di Singapura dan anda akan menjumpai pusat-pusat “pengayaan” (*enrichment*) dan “pembelajaran” (*tuition*), yang menawarkan bantuan untuk anak-anak yang ingin “berhasil di sekolah dan kehidupan” dan pelatihan bagi siswa dalam hal “Seni untuk Mempelajari Cara Belajar.” Beberapa menawarkan untuk mengajarkan mata pelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah – bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Matematika, Sains, Fisika, Ekonomi – sementara yang lain lebih berpusat pada hobi, seperti catur dan robotika. Baik secara akademik ataupun non-akademik, mereka bertujuan, sebagaimana disampaikan oleh suatu pusat pembelajaran, untuk membuat anak-anak itu “siap-diuji.”

Adanya pusat-pusat pembelajaran di mana-mana itu merefleksikan ciri-ciri pokok sistem pendidikan Singapura, dan cara penstratifikasiannya di tahap awal serta pencarian kedewasaan dini memaksa orang tua mencari “pengayaan” bagi anak-anak bahkan sampai ke yang masih berumur tiga tahun. Stratifikasi yang umumnya dilakukan tetap memberi tekanan sepanjang masa sekolah anak-anak,

dan pusat-pusat pengayaan/pembelajaran menysar segala usia dan tingkatan. Sekolah tergantung pada ujian-ujian standar, sehingga semua jenis kegiatan yang ditawarkan disalurkan melalui dan dijual berkaitan dengan “kesiapan menghadapi ujian.” Akhirnya, taruhannya tinggi dan persaingan sedemikian ketat, sehingga pusat-pusat pembelajaran itu menysar tidak hanya siswa-siswa yang gagal tetapi mereka yang ingin mencapai puncak. Di masyarakat Singapura kontemporer, dianggap wajar untuk memandang bimbingan/pengayaan ekstra kurikuler sebagai “kebutuhan” untuk mempertahankan atau meraih capaian.

Kritik yang paling umum terhadap meritokrasi di Singapura adalah bahwa hal itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Orang tua mengeluh tentang terlalu banyaknya pekerjaan rumah dan terlalu banyaknya ujian. Para kritikus yang khawatir tentang ketidaksetaraan merujuk pada adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki kesempatan juga. Tapi tidak banyak yang merujuk pada pelatihan ekstra kurikuler sebagai hasil logis daripada sebagai penyimpangan meritokrasi.

Dalam literatur sosiologis, meritokrasi secara luas diakui sebagai suatu sistem yang menyeleksi, membedakan, dan kemudian melegitimasi para pemenangnya. Hal ini bergantung pada pengertian sempit mengenai apa yang layak mendapat imbalan dan apa yang tidak, dan sistem itu bekerja dengan baik ketika ada apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai “*misrecognition*” - di mana masyarakat percaya bahwa sistem ini didasarkan pada seperangkat prinsip, tetapi dalam kenyataan sebenarnya bekerja pada prinsip lain. Dalam hal ini, sistem Singapura memberikan imbalan pada modal ekonomi dan budaya yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, bukan semata-mata kerja keras individu. Dengan “*misrecognition*” mengenai prinsip dan mekanisme sebenarnya dari stratifikasi, meritokrasi melegitimasi pemenang, menyajikan mereka sebagai individu yang telah berhasil berkat kerja keras dan kecerdasan mereka sendiri daripada melalui kelebihan yang secara tidak adil diwariskan. Dan meritokrasi menunjukkan pada kita sebuah cerita khusus tentang kegagalan, dalam mana kegagalan tersebut dihubungkan dengan atribut individu, bukan dengan ketertinggalan sistemik.

Secara sosiologis, sistem pendidikan Singapura bekerja persis seperti yang telah direkayasa. Selain mempromosikan serangkaian sifat yang sempit dan memilah siswa dalam kategori yang tepat, masyarakat umum percaya begitu saja bahwa sifat-sifat yang dihargai adalah cerminan dari kapasitas dan usaha individu. Orang yang dinilai memiliki keterampilan memadai maju melalui “jurusan” yang benar dan sekolah yang “baik” untuk meraih kualifikasi formal, memperoleh pekerjaan dalam profesi,

bidang akademik, pegawai negeri, atau pemerintah, dan secara luas dipandang berhak atas status dan gaji yang mereka peroleh. Pusat-pusat pengayaan dan pembelajaran tampaknya tidak berbuat banyak untuk mengguncang kepercayaan orang-orang pada logika umum dari sistem. Batas capaiannya dianggap tinggi, kadang-kadang terlalu tinggi, tetapi imbalannya tidak dipandang sebagai hal yang sewenang-wenang.

Wawasan sosiologi kritis tentang pendidikan dan meritokrasi sukar memperoleh perhatian. Untuk memahami mengapa, kita harus mencari dua fitur dari masyarakat Singapura: pelembagaan individualisme dan arti-penting narasi teleologis.

Logika yang mendasari meritokrasi dijalin di dalam kehidupan sehari-hari, melalui beberapa lembaga negara dan kebijakan yang kompleks yang mempengaruhi pilihan dan cara pernikahan, cara melahirkan dan membesarkan anak, manajemen rumah tangga, dan perawatan orang usia lanjut atau sakit. Logikanya, secara terang-terangan, adalah: individu harus mengurus diri sendiri dan keluarga mereka sendiri. Negara Singapura, meskipun sangat intervensionis dalam menggiring orang Singapura ke cara-cara tertentu dalam mengatur kehidupan mereka, dengan tegas menentang ketentuan kesejahteraan universal. Perolehan individu berupa keterampilan dan ijazah, pekerjaan berkelanjutan, dan kemitraan heteroseksual, merupakan prasyarat untuk dapat memperoleh barang publik dan kesejahteraan - perumahan, pelayanan kesehatan, pengasuhan anak, perawatan usia lanjut, dukungan pensiun. Kegagalan untuk mencapai prakondisi - ijazah, pekerjaan, pernikahan, keturunan (yang mereproduksi siklus) - berarti eksklusi dari keamanan, kesejahteraan, dan keanggotaan sosial. Diraihnya capaian (merit) individu dengan demikian merupakan suatu aspek penting untuk dapat memperoleh kesempatan, sementara keluarga inti tetap menjadi unit sosial ekonomi yang menjadi dasar pembuatan kebijakan dan tata kelola - dengan kesalingtergantungan lintas generasi. Dengan demikian, investasi keluarga dalam peraih capaian menjadi masuk akal, dan bahkan diperlukan.

Kedua, meritokrasi didukung oleh narasi teleologis yang begitu kuat mengenai bangsa dan mengenai pada diri sendiri. Meritokrasi Singapura dipertentangkan dengan favoritisme etno-rasial dan diskriminasi di Malaysia, tetangga terdekatnya. Meritokrasi - rasional, sistematis, dan impersonal - telah dinilai sebagai sumber keberhasilan ekonomi fenomenal Singapura, sebagai bangsa yang secara menakutkan berhasil bertahan hidup. Narasi mengenai kemajuan bangsa menemukan konsekuensi dalam narasi biografi orang Singapura yang telah "berhasil." Seperti dalam masyarakat Prancisnya Pierre Bourdieu, "bangsawan negara" - mereka yang dinobatkan sebagai "berjasa" oleh universitas terunggul di dunia - duduk dalam posisi dari mana mereka dapat berbicara dan didengar. Dari kantor elit politik dan pengambil kebijakan, meja wartawan dan profesor universitas, individu melihat sistem melalui lensa narasi biografi mereka yang terbatas: sebagai suatu sistem yang mungkin tidak bekerja dengan sempurna, namun telah jelas bekerja, karena, bagaimanapun juga, mereka atau kita berada di situ, di atas atau dekat dengan yang teratas. Mereka yang dianggap gagal dibungkam, terisolasi, dan jinak dalam narasi kegagalan individu. Yang penting meritokrasi dilihat sebagai suatu sistem yang baik, karena mereka yang mam-

pu melawannya enggan mengkritik suatu sistem yang telah melegitimasi posisi sosial dan rasa berharga mereka sendiri.

Harga yang harus dibayar akibat meritokrasi begitu tinggi. Orang tua berpenghasilan rendah, yang tidak bisa memberikan sumberdaya bagi anak-anak mereka untuk meraih kualitas yang dianggap sebagai capaian, membayar suatu harga yang tinggi dalam nilai material dan simbolik (kekurangan, *lessness*). Seiring dengan meningkatnya ketidaksetaraan di masyarakat, orang yang lebih tinggi pada spektrum pendapatan juga harus membayar harga, karena ketakutan bahwa mobilitas ke bawah walau sedikitpun akan berarti adanya biaya riil. Bayang-bayang bisnis pendidikan yang masif dan mahal, depresi dan kecemasan di kalangan pemuda, stres yang dialami oleh orang tua dan waktu yang terbuang untuk mengawasi pekerjaan rumah, dan tertanamnya ketidaksetaraan melalui tidak meratanya permainan sistem - inilah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Apa yang harus dilakukan sosiolog? Kita membutuhkan baik sebuah program penelitian maupun sebuah agenda aktivis.

Di barisan depan penelitian, semakin jelas bahwa sosiologi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari studi tentang keluarga, kesejahteraan, hubungan negara-masyarakat, dan politik. Untuk menjelajahi meritokrasi, kita membutuhkan semua alat-alat analisis dalam metode penelitian kita, termasuk penghargaan yang lebih dalam tentang cara-cara apa yang tampaknya tidak rasional dari satu sisi (misalnya investasi pribadi yang mahal dalam pendidikan) masuk akal ketika kita memahami dinamika lain (misalnya rezim familialis anti-kesejahteraan). Kita perlu melakukan pendekatan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya dalam hal pendidikan, tetapi juga sebagai suatu agenda luas untuk mempertanyakan ketidaksetaraan dan situs reproduksinya yang majemuk dan saling terjalin.

Lebih dari itu semua, jika metode sosiologi akan digunakan untuk memperoleh perhatian dalam percakapan publik tentang meritokrasi, kita perlu mempertanyakan narasi dominan. Mempertanyakan narasi dominan membutuhkan, sebagai prasyarat, refleksivitas diri. Para akademisi harus bersedia untuk tidak hanya memikirkan meritokrasi dan ketidaksetaraan sebagai masalah yang hanya dihadapi oleh subyek penelitian mereka, tetapi juga untuk meneliti hak istimewa (*privilege*) kita sendiri dan cara kita melanggengkan ketidaksetaraan melalui praktik dan wacana sehari-hari. Mengguncang narasi dominan juga membutuhkan keterlibatan dengan khalayak di luar akademisi. Jika, sebagai sebuah disiplin, kita sudah memiliki alat penting untuk memahami reproduksi hak istimewa dan keterpinggiran, kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dari menyebarluaskan ide-ide ini di luar bidang akademi - melalui tulisan yang disebarluaskan secara publik, melalui pembicaraan dan diskusi dengan berbagai khalayak yang bervariasi, dan melalui keterlibatan strategis dengan masyarakat sipil, pendidik, pembuat kebijakan, dan orang tua. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Youyenn Teo <wyteo@ntu.edu.sg>

> Setelah Sekularisme

Oleh **Francis Khok Gee Lim**, Universitas Teknologi Nanyang, Singapura



Para jemaah beribadah di suatu kelenteng rumahan di suatu flat perumahan rakyat. Foto oleh Francis Lim.

Dalam banyak hal, menjadi orang Singapura berarti terus-menerus berhadapan dengan sistem klasifikasi sosial yang dipaksakan oleh negara, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik. Tentu saja, semua negara-bangsa modern terlibat dalam pendefinisian, pembatasan, dan dengan cara itu mengatur kelompok-kelompok sosial dan budaya berbeda yang berada di bawah naungannya; bagaimanapun juga semua ini merupakan alat-alat utama dalam pemerintahan dan pembangunan negara-bangsa yang modern. Menjadi orang Singapura berarti berurusan secara terus-menerus dengan tiga penanda identitas utama yang dirumuskan oleh negara. Ras, bahasa dan agama adalah tema-tema yang penting dalam mitos pendirian bangsa Singapura, sekaligus juga alat pemerintahan penting yang dipakai negara untuk menjalankan kontrol sosial dan politik.

Ketika setiap siswa sekolah tiap hari mengucapkan “Sumpah” Singapura untuk menjadi bangsa yang bersatu, “tanpa mempertimbangkan bahasa, ras dan agama;” ketika setiap warganegara wajib menyatakan “rasnya” pada kartu tanda penduduk; ketika Dewan Kepresidenan untuk Hak-Hak Kaum Minoritas (*Presidential Council for Minority Rights*) dan Undang-Undang Kerukunan Beragama (*the Maintenance of Religious Harmony Act*, 1991) dianggap inti multikulturalisme Singapura; ketika beberapa orang Kristen dihukum karena dianggap melakukan pemberontakan sebab terlalu bersemangat melakukan penyiaran agama, sementara beberapa orang Muslim “radikal otodidak” ditangkap berdasar Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri (*Internal Security Act*) karena dicurigai merencanakan serangan teroris; orang mudah melihat bahwa

di Singapura, persoalan ras, bahasa dan agama sangat erat berkaitan dan bermuatan politik.

Bagi pemerintah Singapura, sekularisme dinilai penting bagi kerukunan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda etnis dan agama. Penelitian sosiologis apapun mengenai persoalan yang terkait dengan etnisitas dan agama pasti bergumul dengan fakta bahwa Singapura merupakan suatu masyarakat yang beraneka agamanya tetapi secara resmi negaranya sekuler. Keragaman agama di Singapura pada dasarnya merupakan produk dari faktor sejarah, termasuk statusnya sebagai bekas koloni dagang penting yang menarik kehadiran komunitas lain dari kawasan Asia dan dari luarnya. Namun promosi sekularisme muncul dari upaya ideologis yang dengan sadar dilakukan negara sejak pendiriannya – suatu upaya gigih yang terkait erat dengan situasi seputar pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia tahun 1965, dan upaya para pemimpin politik dan warga Singapura untuk membangun suatu identitas nasional yang sangat berbeda dengan budaya Islam yang kuat pada para tetangganya, Malaysia dan Indonesia.

Untuk suatu negara yang mengaku sekuler, cukup mencolok sebenarnya bahwa Singapura mempunyai seorang Menteri Urusan Islam. Pada hari raya Idul Adha (hari raya Qurban) tahun 2016, Menteri ini mengingatkan warga Singapura agar menolak gagasan-gagasan yang merusak integrasi dan mengingatkan mereka bahwa perayaan keagamaan ini “juga menjadi saat yang baik untuk merenungkan arti integrasi keagamaan dan ras di Singapura.” Dalam wacana publik tentang politik di Singapura, Islam seringkali digambarkan sebagai yang Liyan – baik dalam

hubungannya dengan persepsi diri Singapura sebagai suatu negara sekuler maupun sebagai suatu bahaya laten terhadap kerukunan masyarakat yang dikaitkan dengan dugaan penyebaran ideologi-ideologi “ekstremis” di dunia.

Dalam suatu konteks di mana suatu negara yang kuat mengkotak-kotakkan warganya ke dalam kategori-kategori yang rapi, di mana “ras” didefinisikan melalui perbedaan budaya seperti bahasa dan agama, penelitian sosiologis mengenai etnisitas dan agama cenderung memakai dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama, dalam tradisi yang lebih positivistik, memakai “ras” dan “agama” sebagai variabel penentu. Pendekatan kedua memeriksa secara kritis bagaimana kekuasaan menentukan proses penciptaan kotak-kotak identitas, meneliti bagaimana batasan etnis dan agama dapat bergeser dan menjadi kabur di lapangan, menghasilkan identitas yang ambigu, campuran atau majemuk yang menolak pengelompokan secara rapi. Jadi, penelitian mengenai pluralisme agama di Singapura mengungkapkan bahwa banyak pemeluk Hinduisme dan Taoisme yang populer (dari komunitas “India” dan “Tionghoa”) menyembah dewa-dewi seperti Muneeswaran, Tua Pek Kong, Tai Seng, Sang Krishna, dan Hanuman, yang berasal dari dua tradisi keagamaan. Sebagian dewa-dewi ini bahkan ditaruh di kompleks tempat ibadah yang sama.

Kajian kritis terhadap sekulerisme menunjukkan bahwa sekulerisme mungkin telah membantu melegitimasi multirasialisme di Singapura demi mewujudkan kerukunan masyarakat, tetapi kajian itu juga menekankan peran sekulerisme dalam upaya untuk menanamkan pertimbangan-pertimbangan “objektif” dan “rasional” dalam proses politik dan penentuan kebijakan. Sekulerisme gaya Singapura bukanlah versi anti-tuhan yang militan yang pernah ada di beberapa negara komunis; sekulerisme Singapura itu mengakui pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat, dan pada prinsipnya memperlakukan semua agama secara setara. Terpisah dari jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama, negara menganjurkan berbagai kelompok agama untuk menyumbang bagi kepentingan masyarakat, terutama dalam hal menyediakan layanan kesejahteraan sosial dan dalam menegakkan nilai-nilai moral dan budaya.

Sekularisme Singapura mengandung dua hal pokok. Di satu pihak negara berkeras untuk memisahkan agama dari politik, terutama dengan melarang organisasi keagamaan untuk menggerakkan anggotanya dalam kegiatan politik. Di lain pihak, negara bertujuan mengontrol dan mengatur komunitas-komunitas keagamaan dengan menempatkan perwakilan negara sebagai “penasihat” dalam organisasi-organisasi keagamaan seperti Majelis Islam Singapura (MUIS), kelenteng, masjid atau kelompok-kelompok relawan layanan sosial berbasis agama. Para “penasihat” ini bertindak selaku pengawas di lapangan, membentuk wacana keagamaan supaya sejalan dengan agenda negara.

Seperti banyak negara modern, Singapura melakukan sertifikasi hukum terhadap tempat-tempat ibadah bagi macam-macam kelompok agama, memakai konsep teritorial yang fungsional yang didasari oleh ideologi pembangunan dan modernisasi. Sebagai negara kota yang yang menghadapi keterbatasan lahan, aparat berwenang menerapkan pendekatan perencanaan perkotaan yang sangat utilitarian dan intervensionis. Ketika Otoritas Pertanahan Singapura (*Singapore Land Authority*) mengambil lahan yang semula digunakan oleh suatu organisasi keagamaan, kelompok-kelompok keagamaan telah dipaksa pindah, tutup atau bahkan bergabung dengan jemaah lain. Kelenteng Tionghoa yang semula terletak di tempat-tempat berbeda, misalnya, telah disatukan menjadi “kelenteng gabungan,” di mana altar-altar yang berbeda dari kelenteng-kelenteng yang semula terpisah ditampung dalam satu bangunan tunggal. Belum lama ini, pemerintah telah mengusulkan pembangunan gedung bertingkat di mana berbagai kelompok keagamaan dapat menyewa ruangan untuk menjalankan ibadah.

Banyak peneliti mengenai agama di Singapura telah mengkaji strategi negara dalam mengelola dan mengatur agama, tetapi lebih sedikit penelitian mengenai bagaimana beberapa kelompok keagamaan menemukan cara yang inovatif untuk menyalasi kebijakan yang sekuler itu. Terence Chong, Daniel Goh and Mathew Mathews, misalnya, telah meneliti bagaimana beberapa orang Kristen evangelis berusaha untuk secara diam-diam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan wacana politik dengan mengkooptasi pemimpin-pemimpin politik, dan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan konservatif negara dalam hal-hal yang terkait seksualitas dan keluarga. Kajian-kajian mengenai Hinduisme populer termasuk karya Vineeta Sinha tentang ibadah Muneeswaran, menggambarkan kegiatan ritual yang dilakukan di kawasan hutan, jauh dari pengamatan negara. Penelitian saya mengkaji bagaimana Yiguan Dao, suatu “agama keselamatan” transnasional yang berasal dari Tiongkok, telah mengubah apartemen milik negara (resminya adalah tempat “sekuler”) menjadi kelenteng-kelenteng. Demikian pula, orang-orang Kristen telah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan “kelompok sel” di rumah mereka, sementara para perantara roh Tionghoa dan para pendeta Tao membuat “kelenteng rumahan.”

Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kemungkinan keterbatasan pada tata kelola agama oleh negara Singapura, sebagai akibat dari pembedaan sekuler antara ruang keagamaan “pribadi” dan “publik” – satu pembedaan yang mungkin membatasi kemampuan negara dalam melakukan kontrol secara total terhadap agama, dan sekaligus menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok keagamaan tertentu untuk berkegiatan di luar jangkauan tangan-tangan resmi negara. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Francis Khek Gee Lim
<fkglim@ntu.edu.sg>

> Setelah Globalisasi

Oleh **Daniel P.S. Goh**, Universitas Nasional Singapura



Latihan untuk Parade Hari Nasional di platform terapung Marina Bay.
Foto oleh Daniel Goh.

Ada dua kisah temuan yang diungkapkan pada museum-museum nasional dan buku-buku teks sejarah di Singapura. Yang pertama dan terus menerus diceritakan sejak kemerdekaan di tahun 1965 adalah didirikannya pemukiman Inggris di pulau tersebut pada tahun 1819 oleh Sir Stamford Raffles dari Perusahaan India Timur. Dalam cerita ini, sang jenius Raffles dianggap mengakui strategisnya lokasi geografis dari Singapura, yang terletak di ujung Semenanjung Melayu, tepat di persimpangan arah perdagangan antara Lautan Hindia dan Asia Timur. Dengan tata kelola yang baik dan imigrasi yang terbuka, pemukiman tumbuh dari sebuah kampung nelayan Melayu menjadi sebuah kawasan metropolis multi ras yang modern. Cerita kedua yang baru-baru ini diakui adalah tentang pemukiman yang diketahui sejak awal di pulau tersebut, yaitu Temasek. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis dan catatan-catatan tentang penjelajah Asia di masa silam, Temasek merupakan sebuah kota benteng dan pelabuhan dagang kosmopolitan yang didirikan di abad 14 oleh seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang sedang merosot. Wilayah tersebut kemudian dikuasai oleh Kesultanan Malaka di abad 15. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511, kota tersebut ditinggalkan dan tempat tersebut beralih menjadi nama pulau dalam bahasa Sansekerta: yakni Singapura.

Titik akhir bersama dari kedua kisah temuan tersebut adalah kejeniusan dari Partai Aksi Rakyat (*People's Action Party*), partai yang berkuasa di Singapura sejak 1959 ketika hak memilih yang universal dan pemerintahan mandiri dibentuk pertama kali bagi koloni Inggris, dengan demikian mengakui corak-corak kota yang kemudian membawa pada keberhasilan. Rangkaian gambaran

yang umumnya terdapat dalam kedua cerita tersebut adalah bahwa globalisasi bukan hanya bagian penting dari keberhasilan Singapura, tetapi juga amat penting bagi keberlangsungan hidupnya. Jadi, bahkan ketika ada dorongan untuk menempa sebuah komunitas nasional yang dibayangkan (*imagined national community*) di tahun 1965 setelah Singapura secara terpaksa dipisahkan dari Federasi Malaysia, ideolog partai yang berkuasa S. Rajaratnam yang mempunyai peran sentral bagi upaya-upaya membangun bangsa dari negara yang berusia muda tersebut, menyatakan Singapura sebagai sebuah Kota Global di tahun 1972. Pernyataan ini sekarang dielukan sebagai sebuah pidato presiden, karena saat ini Singapura dipuji atas keberhasilan transformasinya dari ekonomi perdagangan dan ekonomi industri menjadi kota global pasca-industrial yang berperan menjadi suatu pusat jasa dan keuangan kunci di Asia yang mengglobal.

Tetapi pandangan Rajaratnam bukan merupakan sebuah argumen yang sembarang tentang kebutuhan ekonomi politik Singapura untuk menjadi sebuah kota global. Mengutip dari Arnold Toynbee, Rajaratnam menegaskan pentingnya apa yang dipijak pada pemikiran tentang pencerahan pasca-Hegelian bahwa Singapura *adalah* suatu kota global. Singapura harus bertahan dan berkembang sebagai suatu kota global sesuai hakekatnya dan memenuhi cita-citanya dalam sejarah. Pembangunan bangsa dan industrialisasi nasional tidak boleh berjalan dalam cara yang bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan dari Singapura sebagai sebuah kota global. Oleh sebab itu, keputusan-keputusan untuk membuat ekonomi selalu menarik bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan membuat masyarakat terbuka terhadap arus pendatang bukan merupakan kewajiban pragmatis bagi keberlangsungan ekonomi, tetapi untuk mempertahankan karakter utama Singapura sebagai sebuah kota global.

Departemen Sosiologi di Universitas Nasional Singapura didirikan pada tahun 1965 sebagai bagian dari upaya-upaya modernisasi. Selama 50 tahun terakhir, khususnya pada dekade-dekade awal, para antropolog dan sosiolog di Departemen tersebut, yang kebanyakan memperoleh pendidikan pascasarjana di universitas-universitas terbaik di negara-negara Barat, terlibat dalam perancangan dan kadang implementasi kebijakan-kebijakan sosial pemerintah. Hal ini termasuk membantu mayoritas luas penduduk untuk menyesuaikan diri dengan [sistem] perumahan umum, pengelolaan pluralisme etnis dan agama, menangani isu-isu perkawinan dan fertilitas, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kampanye-

kampanye rekayasa sosial intensif dari pemerintah untuk memodernisasikan perilaku dan cara pandang satu generasi.

Sarjana-sarjana kritis masa kini mungkin melihat ini sebagai keterlibatan para sosiolog dalam pembentukan ideologi hegemonik dan dominasi otokratis dari partai yang berkuasa. Tetapi ini merupakan tuduhan yang terlalu mudah untuk ditinjau ulang. Dalam tahun-tahun sekarang ini setelah kemerdekaan, setiap orang Singapura atau warga asing yang bersimpati kepada aspirasi-aspirasi pascakolonial tentang bangsa yang baru merdeka akan berhimpun di balik visi menarik tentang partai yang berkuasa, khususnya ketika visi tersebut diartikulasikan dengan mendalam oleh para ideolog dan pemikir seperti Rajaratnam. Bahkan terlebih lagi ketika terjadi kekurangan diskursus dan narasi alternatif mengenai bagaimana Singapura dapat menjadi nyata sesuai dengan sifat kosmopolitannya dan keduniawiannya, [khususnya] setelah kekalahan kamu Kiri selama dekolonisasi dan setelah pemanfaatan secara selektif gagasan-gagasan dan kebijakan sosialis, elemen-elemen yang berkaitan dengan komunisme internasional dipangkas oleh partai penguasa.

Pergeseran penting dalam sosiologi Singapura muncul pada tahun 1990an. Titik baliknya dapat dikatakan adalah publikasi yang ditulis Chua Beng Huat yang berjudul *Communitarian Ideology and Democracy in Singapore* pada tahun 1995, ketika ia mematahkan ideologi dominan dari partai yang berkuasa. Ini diikuti oleh buku tulisan Chua tentang perumahan umum yang diterbitkan pada tahun 1997, dimana ia berargumentasi bahwa perumahan umum, di mana lebih dari empat per lima orang Singapura tinggal, adalah perwujudan dari ideologi komunitarian yang membuat setiap warga menjadi pemangku kepentingan di dalam sistem ekonomi politik yang diselenggarakan bersama partai yang berkuasa. Ini bukan otokrasi yang menopang dominasi yang berkelanjutan dari partai yang berkuasa, tetapi dalam pemikiran teori Gramscian, hegemoni dari gagasan-gagasan ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang yang dinaturalisasikan oleh kekuasaan tunggal partai. Sebuah generasi baru para antropolog dan sosiolog Singapura menanggapi kenyataan yang mengejutkan ini dengan mencari narasi-narasi dan praktik-praktik alternatif untuk didokumentasikan dan dikaji, sebagaimana empat esai sebelumnya yang ditunjukkan dalam seri dialog ini.

Sangat penting untuk diperhatikan, pergeseran ini dalam sosiologi Singapura muncul pada masa di mana Kota Global gagasan Rajaratnam dengan cepat menjadi apa yang tampak seperti Saskia Sassen katakan tentang kota global. Pemerintah menyambut globalisasi neoliberal dan menata ulang ekonomi guna melancarkan akselerasi modal, komoditas, dan arus-arus migrasi. Sebuah perbendaharaan kata baru muncul yang kemudian ditandai oleh dikotomi

yang digunakan bersama dengan kata penghubung “dan”. Warga-warga disebut sebagai orang “kosmopolitan” dan “heartlander,” [warga yang tinggal di suatu wilayah yang vital secara ekonomi politik] merujuk pada kegiatan mereka yang lintas dunia dan secara nyaman berakar pada dunia kehidupan “lokal” di pemukiman umum. Keragaman yang diperluas melalui percepatan imigrasi menjadi bersifat multiras maupun multikultural. Pada tahun 1989, Institut Kajian Asia Tenggara (*Institute of Southeast Asian Studies*) menerbitkan tonggak *Management of Success: The Moulding of Modern Singapore* (Manajemen Keberhasilan: Pembentukan Singapura yang Modern), yang disunting oleh dua ahli geografi, yang memuat artikel-artikel yang ditulis oleh banyak ilmuwan sosial generasi pertama Singapura untuk memperingati keberhasilan masuknya Singapura ke dalam sistem kapitalis global sebagai sebuah Macan Asia. Pada tahun 2010, Institut yang sama menerbitkan *Management of Success: Singapore Revisited* (Manajemen Keberhasilan: Singapura Ditinjau-ulang), yang disunting oleh sosiolog Terence Chong, yang saat ini dengan artikel-artikel berupaya untuk memahami ketegangan-ketegangan yang dibawa oleh globalisasi neoliberal.

Jika globalisasi adalah Singapura, maka apa yang membentuk sosiologi Singapura setelah globalisasi? Ada tiga kemungkinan: distopia, utopia, dan apokaliptis (kehancuran). Dalam tinjauan ulang, saya melihat artikel saya di *Management of Success* terbitan tahun 2010 sebagai pendekatan yang cenderung distopian. Tulisan itu membahas upaya-upaya pemerintah untuk merajut multikulturalisme baru ke dalam multirasialisme lama guna mengelola keragaman yang dihasilkan oleh imigrasi dan memecahkan ketegangan-ketegangan antar etnis yang disebabkan oleh ketimpangan-ketimpangan ekonomi seraya tetap memelihara pengendalian politik. Ketegangan-ketegangan globalisasi neoliberal yang terjadi saat ini berlapis-lapis ke dalam kontradiksi-kontradiksi modernisasi yang sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan keluar untuk dipecahkan kecuali untuk selalu bergantung kepada pemerintahan yang kuat untuk mengelolanya. Itu jelas merupakan sebuah kerangka Durkheimian, yang dimulai dengan masalah solidaritas dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan berakhir dengan pesimisme di mana ketergantungan pada negara untuk integrasi sosial dan peraturan tak terhindarkan. Implikasinya adalah bahwa pencarian praktik-praktik dan narasi-narasi alternatif yang menjadi lazim dalam sosiologi Singapura hanya bermanfaat dengan cara menggunakan praktik-praktik dan narasi-narasi alternatif ini ke dalam repertoar budaya karena negara perlu memperbarui pedoman-pedoman moralnya.

Kemungkinan kedua adalah bahwa pendekatan utopia dan kita mendapatkan ini dalam esai-esai yang ditulis di sini. Pendekatan ini membangkitkan semangat *Utopia* Thomas More dalam mencari kebiasaan-kebiasaan sosial, politik dan religius dari sebuah negara republik yang ideal pada

sebuah pulau yang amat padat yang ditandai oleh demokrasi dan kesetaraan. Penekanan terletak pada ketergantungan minimal pada pemerintah, dan harapan ditujukan untuk menciptakan ruang yang dapat diperluas bagi otonomi perorangan dan pemenuhan kebutuhan personal yang tidak dikendalikan oleh negara. Masyarakat menjadi kreatif secara ekonomi, sadar secara sosial, dan terlibat secara politik. Bagi beberapa antropolog dan sosiolog, penemuan dan analisis tentang ruang-ruang harapan ini di Singapura, yang kadang muncul keberadaannya berkat dukungan yang ironis dari globalisasi neoliberal, termasuk sudah cukup. Kepercayaan adalah bahwa kisah-kisah alternatif seperti itu akan menginspirasi pada mahasiswa di ruang-ruang kelas universitas, sehingga mereka pada gilirannya akan keluar dan mengubah dunia. Bagi beberapa di antaranya, mereka akan bergerak lebih lanjut dan memetakan secara eksplisit aktivisme masyarakat awam maupun orang-orang biasa dalam mengubah keadaan-keadaan dunia kehidupan mereka. Tetapi, bagi yang lain, seperti yang ditulis Youyenn Teo dalam esai yang diterbitkan di edisi ini, mereka akan menyerukan aktivisme akademis yang sadar diri untuk membawa alternatif-alternatif seperti itu keluar menuju audiens yang lebih luas sehingga sosiolog menjadi seorang agen perubahan.

Penting untuk diperhatikan, pendekatan utopia tidak bersifat menentang maupun radikal secara politik, meskipun hal itu cenderung disalahkan oleh elit-elit yang berkuasa yang cemburu terhadap dominasi ideologi mereka. Pendekatan utopia sangat sejalan dengan visi Kota Global Rajaratnam. Ia mengakhiri pidatonya di tahun 1972 dengan mendesak para koresponden media untuk membantu para audiensnya [memahami] “lengkapilah masyarakat kita secara intelektual dan spiritual untuk membangun kota global [...] menjadi kota

surgawi yang telah lama diimpikan oleh para nabi dan peramal” (*The Straits Times*, 7 Februari, 1972). Garis asal-usul pendekatan utopia tersebut dapat ditelusuri sejak Augustine dari Hippo hingga More.

Kemungkinan terakhir adalah pendekatan apokaliptis. Adalah hal yang tak dapat dipertahankan secara politik untuk menulis dengan menggunakan pendekatan ini di masyarakat Singapura yang konservatif, tetapi barangkali secara intelektual dan politis perlu untuk berpikir melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diangkat oleh pendekatan seperti ini. Jika globalisasi adalah Singapura, maka kemudian apa yang akan terjadi jika globalisasi mulai berbalik, yakni ketika sistem dunia mulai mengalami deglobalisasi? Ini sudah pernah terjadi suatu kali di tahun 1920an dan 1930an, dan hal ini merupakan periode yang hiruk-pikuk di mana kaum Kiri dan mobilisasi politik kalangan etno-nasionalis di tanah Melayu yang dikuasai oleh Inggris meletakkan landasan politik bagi terjadinya konflik-konflik kekerasan dekolonisasi setelah Perang Dunia kedua. Pada gilirannya, konflik-konflik tersebut mengarah pada tiga entitas nasional yang tidak terbayangkan separuh abad sebelumnya, yakni: pertama, negara Federasi Melayu, kemudian negara Federasi Malaysia dan akhirnya Republik Singapura. Entitas-entitas ini mentransformasikan masyarakat-masyarakat lokal melampaui apa yang dipikirkan sebagai kemungkinan oleh generasi awal. Masa depan apa yang tidak dapat dibayangkan dan dipikirkan saat ini? Ke mana masyarakat Singapura jika apa yang tidak terbayangkan itu terjadi? Akan jadi seperti apa Singapura setelah globalisasi, ketika negara tersebut berhenti menjadi Kota Global? ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Daniel PS Goh <dsong@nus.edu.sg>

> Menuju Masa Depan Iliberal

Anti-Genderisme and Anti-Globalisasi

Oleh **Agnieszka Graff**, Universitas Warsaw, Poland dan **Elżbieta Korolczuk**, Universitas Södertörn, Swedia, dan anggota Komite Penelitian ISA tentang Perempuan dan Masyarakat (RC32) dan Kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47)



Spanduk di Rapat Umum Anti-Gender, 30 Agustus 2015. Foto oleh Elżbieta Korolczuk.

Gender merupakan persoalan penting dalam politik global. Setelah pemilihan presiden di AS kita jauh lebih tahu mengenai hal tersebut daripada sebelumnya: daya tarik massa terhadap kebijakan Trump terhadap perempuan secara terang-terangan hanya merupakan bagian dari masalah. Populisme di AS dan di tempat lain tidak hanya dilandasi ketidakstabilan ekonomi dan ketakutan, tetapi juga kecemasan sekitar relasi gender,

(homo) seksualitas dan reproduksi. Dari suatu negara ke negara lain, kritik terhadap apa yang oleh kaum konservatif (terutama Katolik) disebut “gender” atau “genderisme” - kebijakan kesetaraan gender, pendidikan seks, LGBTQ dan hak-hak reproduksi - telah membantu untuk memobilisasi laki-laki maupun perempuan, untuk membuka jalan bagi pemimpin populis. Meskipun oposisi terhadap feminisme dan kebijakan kesetaraan gender bukanlah hal yang baru, namun

>>

kebangkitan saat ini menandai peralihan dari paradigma neo-konservatif sebelumnya: konservatisme sosial saat ini secara eksplisit terkait dengan permusuhan terhadap modal global.

Di Polandia, kemenangan pemilu tahun 2015 dari Partai Hukum dan Keadilan dari kelompok populis sayap kanan didahului, dan bisa dibayangkan dimungkinkan, melalui kampanye melawan “genderisme” di media yang konservatif dan melalui wacana keagamaan. Sejak 2012, Gereja Katolik Polandia dan kelompok konservatif telah melakukan banyak inisiatif, menentang penggunaan istilah “gender” dalam dokumen kebijakan dan wacana publik, melawan pendidikan dan undang-undang kesetaraan gender (misalnya ratifikasi Konvensi Istanbul mengenai pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga), dan berusaha untuk membatasi hak-hak seksual dan reproduksi. Kampanye ini melibatkan pemimpin agama Katolik, politisi konservatif, tim pemikir sayap kanan dan kelompok anti-pilihan (*anti-choice*). Kelompok lainnya bergabung; misalnya, gerakan massa akar rumput orangtua “*Ratujmy Maluchy!*” (“*Selamatkan Si Kecil!*”), yang muncul sekitar tahun 2009 untuk menentang reformasi pendidikan, bergabung dalam memerangi Konvensi Istanbul dengan alasan bahwa tindakan yang dirancang untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga menjadi ancaman bagi otoritas orangtua. Organisasi dan jaringan akar rumput telah membantu dalam memobilisasi sejumlah besar orang, terutama orang tua yang prihatin, yang khawatir mengenai ancaman terhadap anak-anak mereka yang dilakukan oleh “lobi homoseksual” dan para pendidik seksual. Kaum anti-gender mengklaim bahwa mereka melindungi anak-anak dan keluarga, serta nilai-nilai budaya dan agama Polandia dari kaum feminis, LGBTQ dan aktivis hak asasi manusia, yang diduga didukung oleh politisi liberal dan fihak Barat yang korup. Dalam wacana anti-gender ini, partai

yang berkuasa pada saat itu, Platform Kewargaan (*Civic Platform*) yang liberal konservatif, sering digambarkan sebagai bagian dari ekstrim kiri, dan dituduh berusaha untuk menghancurkan keluarga “tradisional” dan Bangsa Polandia, atas permintaan lembaga-lembaga asing, seperti Uni Eropa.

Dalam serangan konservatif ini, “gender” bukanlah label yang digunakan untuk membahas perbedaan jenis kelamin atau untuk menganalisis konstruksi maskulinitas dan femininitas. Sebaliknya, “gender” secara konsisten disajikan sebagai suatu konspirasi internasional, yang berasal dari revolusi seksual dan/atau kesetaraan gender yang ditegakkan dengan gaya komunis. Didukung oleh badan-badan transnasional seperti PBB dan modal global, para “genderis” diduga bertujuan untuk mempromosikan aborsi, dekadensi moral dan penyimpangan, maupun individualisme tak terkendali yang menghancurkan komunitas dan keluarga tradisional. Penegakan perubahan kelamin pada anak-anak yang tidak bersalah secara tidak bertanggung jawab diduga menjadi salah satu tujuan gerakan ini; konsep “gender” secara konsisten dikaitkan dengan penghapusan perbedaan jenis kelamin maupun kecacauan dalam ranah seksualitas manusia, yang mengarah ke de-populasi di beberapa bagian dunia.

Anti-genderisme bukan hanya merupakan suatu kekhasan Polandia. Sebuah wacana serupa juga bisa ditemukan di tempat lain. Di Rusia kontemporer, klaim bahwa para homoseksual dan promotor kesetaraan gender mengancam nilai-nilai tradisional lokal telah memperkuat dukungan rakyat terhadap rezim Putin; di Prancis, mobilisasi massa menentang pernikahan gay jelas memberikan kontribusi bagi popularitas Front Nasional. Di AS, kebencian terbuka Donald Trump terhadap perempuan (*misogyny*) tidak menghalangi kemengannya, pemilih tampaknya juga tidak termobilisasi oleh kemungkinan memilih presiden perempuan perta-

ma di negara itu (pada kenyataannya, 53% dari perempuan Amerika Kulit Putih memilih Trump). Apa hubungan antara bangkitnya populisme sayap kanan dan anti-genderisme? Kedua ideologi tersebut menyatu tidak hanya dalam promosi visi sosial-konservatif dari relasi gender, tetapi juga dalam membidik elit liberal sebagai penanggung jawab atas merosotnya ekonomi dan sosial penduduk secara umum.

Kami telah mengembangkan analisis kami melalui partisipasi dalam beberapa proyek kolaboratif yang merespon kampanye anti-gender baru-baru ini di Eropa, maupun melalui pengalaman kami selaku aktivis, yang meliputi partisipasi dalam beberapa inisiatif yang dijadikan sasaran oleh kampanye anti-gender Polandia. Kami telah menganalisis berbagai teks: buku dan artikel yang ditulis oleh suara-suara kunci di sirkuit anti-gender; wawancara dan pernyataan publik oleh para pendukung kunci anti-genderisme (termasuk dua Paus, pemimpin Katolik lokal dan intelektual); liputan media kegiatan anti-gender; dan berbagai bahan yang dipublikasikan di situs gerakan dan organisasi, seperti jaringan Polandia www.stopgender.pl dan platform internasional seperti www.citizengo.org atau www.lifesitenews.com.

Semua teks “anti-gender” menampilkan kesan ancaman bahaya dari elit liberal, termasuk feminis, yang digambarkan berbahaya dan berkuasa. Penentang kesetaraan gender dan hak-hak gay, sebaliknya, mengklaim mewakili rakyat kecil, yang digambarkan sebagai pekerja keras dan mengabdikan kepada keluarga mereka. Yang penting, yang mendasari perasaan menjadi korban memiliki baik dimensi budaya maupun ekonomi: para “genderis” dipandang mempunyai pendanaan yang baik dan terhubung secara baik ke elit global; rakyat kecil dipandang sebagai pembayar harga globalisasi. Dinamika budaya dan ekonomi yang saling berhubungan ini jelas tercermin dalam strategi diskursif pilihan

anti-genderisme: penggunaan versi konservatif dari kerangka anti-kolonial. Genderisme secara konsisten disajikan sebagai suatu pemaksaan asing, disamakan dengan kolonisasi, dan dibandingkan dengan totaliterisme abad kedua puluh dan terorisme global. Argumen ini terputus dari perdebatan yang sebenarnya mengenai dominasi sejarah kolonial oleh Barat, tetapi ini sering digunakan bahkan di negara-negara yang tidak memiliki riwayat kolonial yang nyata, seperti Polandia. Seperti dalam semua narasi populis, retorika ini menentang elit internasional yang korup, yang mengeksploitasi rakyat kecil dan “rakyat” itu sendiri, yang ditampilkan sebagai lokal, otentik dan dimusuhi.

Sebuah contoh penting mengenai wacana anti-gender semacam ini berasal dari Menteri Kehakiman Polandia Jaroslaw Gowin, yang pada tahun 2012 secara keras menentang ratifikasi Konvensi Istanbul. Dia mengklaim bahwa Konvensi tersebut adalah “pengusung ideologi gender,” sebuah ideologi Kuda Troya yang agenda tersembunyinya adalah pembongkaran keluarga tradisional dan nilai-nilai budaya lokal. Demikian pula, pada bulan Januari 2016, Paus Francis memperingatkan umatnya terhadap “ideologi gender” yang merupakan suatu pemaksaan yang berbahaya oleh negara-negara Barat yang kaya, suatu bentuk penjajahan ideologis tetapi juga ekonomi. Menurut Paus, bantuan luar negeri dan pendidikan secara rutin terkait dengan kebijakan kesetaraan gender, tetapi “keluarga yang baik dan kuat” dapat mengatasi ancaman ini.

Dalam deskripsi “genderisme” mereka, pemimpin Gereja Katolik, fundamentalis sayap kanan dan pakar gerakan anti gender menghubungkan penjajahan ideologis dengan kekuatan ekonomi – suatu kekuatan yang secara krusial digambarkan terletak di lembaga dan perusahaan transna-

sional. Di Polandia, sebagian besar aktivis menunjuk ke Uni Eropa; tetapi badan-badan internasional lain, ya-
yasan dan asosiasi dibidik juga, termasuk Dana Global untuk memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria, WHO, PBB atau UNICEF, dan Bank Dunia. Dalam konteks Polandia, anti-genderis juga membidik struktur masyarakat sipil yang dibentuk pada 1990-an oleh donor Barat, khususnya kelompok hak LGBTQ seperti Kampanye melawan Homofobia (KPH). Kelompok ini digambarkan sebagai agen elit asing yang korup. Sebagai otoritas kunci anti-genderis Eropa, Gabrielle Kuby memasukkannya ke dalam sebuah wawancara untuk Laporan Dunia Katolik (*Catholic World Report*):

Revolusi seksual global sekarang dilaksanakan oleh elit kekuasaan. Ini termasuk organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa, dengan jaringan sub-organisasi mereka yang tak diketahui; perusahaan-perusahaan global seperti Amazon, Google, dan Microsoft; yayasan-yayasan besar seperti Rockefeller dan Guggenheim; individu-individu yang sangat kaya seperti Bill dan Melinda Gates, Ted Turner, Georges Soros, dan Warren Buffett; dan organisasi-organisasi non-pemerintah seperti Federasi Keluarga Berencana Internasional dan Asosiasi Lesbian dan Gay Internasional.

Meskipun menitikberatkan pada nilai-nilai “lokal” dan “otentik,” gerakan anti-gender diperkuat oleh suatu jaringan transnasional, termasuk organisasi-organisasi seperti Kongres Keluarga Dunia dan memobilisasi program seperti CitizenGO. Misalnya, Polandia Ordo Iuris Institute bekerjasama erat dengan Aliansi Pemuda Dunia Eropa, Keluarga Katolik Serikat dan Institut Hak Asasi Manusia yang berbasis di Amerika, Penjaga Martabat Eropa yang berbasis di Brussels, dan Masyarakat Inggris untuk Perlindungan Anak yang Belum Lahir, salah

satu organisasi anti-pilihan (*anti-choice*) tertua di dunia. Walaupun memiliki koneksi transnasional, kaum anti-genderis secara rutin menggunakan wacana anti-elitis, merujuk pada martabat rakyat biasa dan identitas mereka sebagai suatu mayoritas yang tertindas untuk memobilisasi pendukung, dengan berhasil menarik perhatian pada kecemasan yang masuk akal mengenai masa depan keluarga dan anak-anak mereka.

Aktor-aktor konservatif telah berhasil memanfaatkan tumbuhnya kecemasan dan ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh ideologi dan kebijakan neoliberal. Sentimen tersebut disalurkan ke dalam kemarahan terhadap elit dekaden, digambarkan di Polandia sebagai “pemuja Eropa” (salah satu slogan sayap kanan ekstrim adalah: “Pedofil dan Penyodomi, ini adalah pemuja Eropa!”) yang secara moral rusak, atau diwakili di Amerika Serikat dengan mengacu kepada “Hillary Penipu.” Gelombang baru anti-genderisme membangun oposisi terhadap kebijakan dan wacana kesetaraan gender sejak akhir 1970-an, tetapi juga mencerminkan kebangkitan populisme illiberal transnasional dan nasionalisme lokal. Dengan menyajikannya sebagai sebuah gerakan membela nilai-nilai lokal “otentik” dan rakyat umum terhadap kekuatan global asing dan elit kaya yang korup, dengan menyamakan “gender” dengan individualisme yang tak terkendali dan eksploitasi budaya dan ekonomi, strategi ini membuka jalan bagi keberhasilan politik populisme illiberal. Anti-genderisme telah menjadi suatu bahasa konservatif baru dari perlawanan terhadap globalisasi neoliberal. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
Elzbieta Korolczuk <bekorol@gmail.com>
Agnieszka Graff <abgraff@go2.pl>

> Memperjuangkan Hak Reproduksi di Polandia

Oleh **Julia Kubisa**, Universitas Warsawa, Polandia



Kaum perempuan Polandia di Warsawa memprotes undang-undang baru tentang aborsi, 3 Oktober 2016. Foto oleh Elżbieta Korolczuk.

Di musim gugur 2016, pecah gelombang protes baru kaum perempuan melawan rencana kriminalisasi aborsi di Polandia. Para feminis Polandia telah bertarung melawan Undang-Undang Anti Aborsi di Polandia sejak Undang-undang yang keras tersebut diundangkan pada tahun 1993. Undang-Undang Aborsi Polandia, salah satu undang-undang yang paling ketat di Uni Eropa, hanya memperbolehkan aborsi dalam kasus *incest* atau perkosaan, ancaman terhadap kesehatan dan hidup seorang perempuan, dan kelainan genetik pada janin.

Seperti yang sudah dikemukakan oleh para aktivis Polandia, pembatasan legal ini telah menghidupkan jaringan aborsi bawah tanah di negeri ini, namun isu ini belum mendapatkan momentumnya hingga tahun 2016. Setelah pemilihan umum parlemen Polandia tahun 2015 memenangkan kelompok sayap kanan Partai Hukum dan Keadilan sebagai mayoritas dalam parlemen, usul pembatasan hak reproduksi sebenarnya hanya menunggu waktu saja. Di awal tahun 2016 para pemimpin pemerintahan, termasuk di dalamnya Perdana Menteri Ny. Beata Szydło, memberi sinyal dukungan pada larangan menyeluruh terhadap aborsi, dan *Ordo Iuris*, sebuah organisasi nonpemerintah yang sangat konservatif, mulai mengumpulkan tanda tangan untuk mendukung hukuman penjara kepada perempuan dan ginekolog, dan menuntut agar otoritas yang ada melakukan investigasi terhadap kasus-kasus keguguran untuk menjamin bahwa keguguran tersebut tidak disebabkan oleh aborsi medis dengan menggunakan obat.

Gelombang kemarahan yang dipicu oleh kampanye terbaru *Ordo Iuris* secara cepat menjelma ke dalam dua kelompok aktivis: *Girls for Girls*, sebuah kelompok aktivis akar rumput dengan agenda feminis, dan *Save the Women*, insiatif legislatif yang diangkat oleh kelompok feminis sosial demokrat yang berkampanye untuk liberalisasi Undang-Undang anti aborsi di Polandia.

Pada pertengahan 2016 *Ordo Iuris* mengumumkan

bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 tanda tangan yang mendukung usulan mereka, sementara *Save the Women* telah mengumpulkan 250.000 tanda tangan. Kedua usulan diserahkan ke Parlemen. Beberapa organisasi Katolik sayap kanan telah menyerahkan beberapa usulan serupa dalam versi-versi sebelumnya, tetapi dikalahkan dalam pemungutan suara; tidak ada satu pun inisiatif pro-liberalisasi yang diserahkan sejak awal 1990-an, ketika suatu petisi pro-liberalisasi yang ditandatangani oleh 1,2 juta warga ditolak.

Kali ini parlemen langsung menolak proyek *Save the Women*, sebaliknya malah melanjutkan diskusi tentang usulan soal kriminalisasi – sebuah langkah yang memicu demonstrasi oleh *Save the Women*, dan oleh kelompok sayap kiri Partai Razem, yang menghimbau para pendukungnya untuk menggunakan kostum hitam dan bersama melakukan protes atau mengunggah foto di media sosial dengan hashtag *#blackprotest*. Ketika salah seorang artis yang sangat dihormati di Polandia menyarankan pemogokan perempuan se-Polandia, meniru model pemogokan tahun 1975 oleh perempuan di Islandia, para aktivis media sosial mendukung ide tersebut, mengumumkan bahwa tanggal 3 Oktober (2016) menjadi tanggal untuk Pemogokan Protes Hitam Perempuan Se-Polandia (*All-Poland Women Black Protest Strike*). Seruan aksi ini tidak diprakarsai oleh organisasi perempuan tertentu, meskipun banyak aktivis gerakan feminis menyokong inisiatif ini dengan menawarkan waktu dan sumber daya mereka untuk usaha ini. Beberapa hari menjelang pemogokan, banyak pengguna tenaga kerja swasta individual, dan pejabat dari pemerintah setempat menyatakan dukungan terhadap para perempuan yang ingin melakukan pemogokan, dengan cara mereka secara langsung memberitahu para pekerja untuk mengambil cuti pada tanggal 3 Oktober. Beberapa dosen universitas meniadakan kegiatan perkuliahan.

Meskipun terhalang, seperti misalnya oleh status legal pemogokan, aksi ini terbukti sukses besar, dengan mobilisasi dalam jumlah besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seperti demonstrasi yang biasanya hanya terjadi di ibukota negara dan kota-kota besar lain, Pemogokan Perempuan mendapatkan dukungan sungguh-sungguh dari seluruh Polandia. Para perempuan dan gadis, dengan dukungan segelintir pria, mengorganisir aksi di sedikitnya 142 kota dan desa di seluruh negeri, yang melibatkan sekitar 150 ribu orang – yang kesemuanya berpakaian hitam. Slogan-slogannya mengacu pada hak-hak dasar perempuan, pilihan reproduksi, dan martabat perempuan, yang kesemuanya akan terkena dampak dengan pelarangan total terhadap aborsi. Karena hujan deras pada saat pemogokan, kebanyakan peserta berdiri dan berjalan dengan berpayung yang secara tak disengaja menjadi simbol protes.

Skala dan energi protes jelas mengagetkan partai yang berkuasa dan para wakil dari Gereja Katolik. Tanggapan pertama yang muncul secara eksplisit merupakan ungkapan prasangka terhadap perempuan (*misogynist*): seorang Uskup Katolik menyatakan bahwa perempuan “tidak dapat mengandung selama diperkosa”, seorang politikus populer menekankan bahwa “perempuan berganti-ganti pasangan seks” dan harus dikontrol, dan Menteri Luar Negeri menyebutkan bahwa perempuan sama sekali tidak bertanggungjawab. Meskipun demikian, tiga hari setelah protes, parlemen menolak usulan larangan menyeluruh terhadap

aborsi – salah satu dari sejumlah kecil kekalahan terbaru oleh partai yang berkuasa di Polandia.

Pemerintah kemudian membuang retorika konfrontatifnya, dan sebagai gantinya menganut suatu pendekatan yang lebih mengena dan lunak. Perdana Menteri mengumumkan bahwa perempuan Polandia yang mengalami suatu “kehamilan yang sulit” (*difficult pregnancy*) – sebuah ungkapan eufemisme, di mana “sulit” mengacu pada kasus-kasus penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan kelainan janin yang ditemukan selama kehamilan – akan menerima bantuan yang sifatnya hanya satu kali sebesar sekitar 1.000 Euro, yang pada dasarnya merupakan bantuan bagi persalinan seorang anak yang akan cepat meninggal setelah lahir. Bantuan ini sudah diterapkan, meskipun muncul kritik bahwa ini menjadikan perempuan sebagai obyek.

Banyak di antara aktivis yang terlibat dalam pengorganisasian Pemogokan Protes Hitam Perempuan Se-Polandia memutuskan untuk berjalan terus agar pemerintah masih tetap merasakan tekanan. Dua minggu kemudian, mereka melancarkan satu aksi pemogokan lain yang lebih kecil, namun membawa sebelas butir agenda tuntutan, mempromosikan martabat dan kebebasan perempuan, menolak agresi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan militerisasi masyarakat, serta menyerukan adanya kebijakan lebih berorientasi pada perempuan. Protes Hitam (*Black Protest*) menginspirasi sekurang-kurangnya dua orang selebriti untuk mendiskusikan aborsi mereka sendiri di hadapan publik, yang mendobrak sesuatu yang tabu diwacanakan secara publik. Protes Hitam mendapatkan dukungan publik yang bermakna, dengan 58% orang Polandia menyatakan dukungan mereka. Mereka juga mendapatkan pengakuan internasional secara luas, memberikan inspirasi kepada kaum perempuan di Argentina, Islandia, dan Korea Selatan untuk mengorganisir protes serupa. Barbara Nowacka dari *Save the Women* dan Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dari *Razem* mendapatkan penghargaan *Global Thinkers 2016 Award* dari Majalah *Foreign Policy* sebagai wakil dari Gerakan Pemogokan Protes Hitam Perempuan.

Sejak pemogokan Pemerintah Polandia melanjutkan terus pendekatan lebih lunaknya, membuang segala rujukan ke pembatasan lebih lanjut terhadap aborsi, dan sebaliknya mempromosikan suatu wacana dukungan untuk anak-anak yang lahir cacat meskipun belum mengambil langkah nyata terkait peningkatan pendanaan untuk hal ini. Namun aktivisme feminis yang menghasilkan pemogokan tingkat nasional pada bulan Oktober terus menggaung: baru-baru ini, ketika Menteri Kesehatan menurunkan standar nasional untuk kelahiran dan perawatan ibu usai melahirkan di rumah sakit, dan ketika Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menolak keputusan Konvensi Istanbul yang dihasilkan Dewan Eropa terhadap perlindungan dan perlawanan atas kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga, para perempuan yang tergabung dalam Pemogokan Perempuan Se-Polandia menyatakan bahwa mereka “tidak akan melipat payung-payung mereka.” ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Julia Kubisa <juliakubisa@gmail.com>

> Jaringan Sosiolog Muda ISA

Oleh **Oleg Komlik**, Universitas Ben-Gurion, Israel dan Ketua Jaringan Sosiolog Muda, ISA



Ilustrasi oleh Arbu

Jaringan Sosiolog Muda (*Junior Sociologists Network, JSN*) dari Asosiasi Sosiologi Internasional mempertemukan para mahasiswa, akademisi pemula dan para praktisi, yang melibatkan dirinya dalam sosiologi dan disiplin terkait, dalam lintas ketertarikan tema dan pendekatan ilmiah. Untuk menggambarkan tugas dan kegiatan JSN saat ini, saya melalui tulisan ini berharap dapat menunjukkan bagaimana komunitas internasional yang unik ini mempromosikan jalur profesional dari para anggotanya dan secara lebih luas lagi, memupuk sosiologi sebagai sebuah panggilan hidup.

Dimulai pada tahun 2006 dan didukung oleh para Presiden ISA dan Komite Eksekutif, JSN berkembang dari pengalaman pemberdayaan peserta di Laboratorium ISA untuk mahasis-

wa program doktor, Kompetisi Sosiolog Muda ISA (*ISA Junior Sociologists Competition*) dan kongres-kongres ISA. Para anggota komunitas kami secara bersamaan berakar di tingkat lokal dan terhubung secara global – suatu kondisi yang menarik dan sekaligus menantang. Menyadari potensi ini, maka misi JSN adalah untuk mengaktualisasikan potensi tersebut. Tujuan dari JSN dengan demikian adalah menyediakan bagi para sosiolog muda suatu platform yang berguna dan mendukung untuk berbagi informasi, bertukar ide dan menyiapkan kolaborasi untuk memajukan karir mereka, dan menciptakan, menyebarkan serta menerapkan pengetahuan dan wawasan sosiologis.

Dalam dua setengah tahun terakhir, kami telah menyaksikan perkembangan menarik dari JSN. Menyusul

>>

upaya proaktif komprehensif untuk menyebarluaskan berita tentang JSN, terutama di Selatan Global, keanggotaan jaringan telah jauh berkembang, dengan menyertakan lebih dari 2.500 mahasiswa MA, kandidat Doktor, dosen junior dan bahkan dosen senior. Meskipun sebagian besar peserta adalah para akademisi, praktisi dan aktivis juga telah diundang untuk bergabung dengan jaringan; kami menyambut semua orang yang memandang sosiologi sebagai jangkar dari pekerjaan mereka.

Kegiatan JSN didasarkan pada empat pilar yang saling melengkapi. Pertama-tama, sebuah [daftar alamat](#) (*mailing list*) JSN yang baru telah secara cepat menjadi sumber populer dari informasi untuk para sosiolog muda. Setiap dua minggu, laporan berkala (*newsletter*) JSN memberikan informasi terkini yang bermanfaat, menarik dan relevan: undangan untuk membuat makalah, posisi *post-doc*, pemberitahuan tentang hibah, lowongan pekerjaan, dan artikel dengan pemikiran yang menantang mengenai sosiologi dan kehidupan akademik.

Kedua, abstrak-abstrak disertasi ISA adalah pangkalan data dengan akses terbuka (*open-access database*) yang memungkinkan sosiolog muda untuk menyajikan abstrak disertasi doktor mereka, bersama dengan biografi singkat dan rincian kontak; sekarang

ini sudah ada sekitar 650 abstrak. Dengan membantu peserta menemukan orang lain yang mempelajari topik yang sama, platform JSN memunculkan kolaborasi antar para peneliti. Selain itu, para penerbit sudah mulai menelusuri pangkalan data JSN ini, dan kadang-kadang mereka menghubungi orang-orang yang telah mengirimkan abstrak.

Ketiga, sejak JSN meluncurkan halaman [Facebook](#) dan [Twitter](#) dua setengah tahun yang lalu, ribuan pengikut dan pengunjung telah dapat mengambil manfaat dari efek berlipatganda dan tersebarnya informasi di media sosial, dengan mengakses dan mengunggah (*posting*) pengu-
muman *online*, abstrak disertasi dan tautan menarik.

Terakhir namun tak kalah penting, JSN dengan bangga mempertahankan tradisi mengorganisir bersama konferensi internasional tahunan Ilmu-ilmu Sosial Slovenia dan mensponsori pertemuan akademik lainnya, mempertemukan akademisi muda dari berbagai negara dan kawasan.

Saya mengucapkan terima kasih saya kepada para anggota dewan JSN Dolores Modic dan Tamara B. Valic atas keterlibatan mereka, dan kepada sekretariat ISA untuk bantuan mereka yang cepat dan berkesinambungan. Pada kesempatan

ini saya ingin mencatat bahwa JSN selalu terbuka untuk saran baru; setiap inisiatif dan bantuan akan sangat dihargai.

Seiring dengan proyek-proyek penting dari ISA dan komite-komite penelitiannya, JSN membantu membangun suatu komunitas global sosiolog yang mantap, yang lebih siap untuk mengungkap labirin morfologis sosial-politik. Sebagai sosiolog muda, sambil membuka jalan kita yang terjal di tengah-tengah realitas neo-liberal dan terpaan kekuatan pasar (*marketization*) serta dalam bayang-bayang kecenderungan otoriter dan nasionalistis, kami tetap sadar akan tugas penting dan esensi sosiologi sebagai sebuah panggilan. Selama dalam perjalanan bersama ini, dengan didukung oleh rekan-rekan yang telah mapan, kami berharap untuk maju bersama-sama, mengarah obor intelektual sosiologi yang begitu berharga. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Oleg Komlik
<komlik@gmail.com>

> Menerjemahkan Global Dialogue ke dalam Bahasa Indonesia

Oleh **Kamanto Sunarto**, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Pada bulan April tahun 2015 sekelompok sosiolog Indonesia membentuk tim editorial Indonesia. *Dialog Global* Volume 5 edisi 3, edisi pertama *Global Dialogue* (GD) dalam bahasa Indonesia, yang pada waktu itu merupakan bahasa keenambelas, diterbitkan pada bulan September 2015.

Tim terdiri atas sembilan orang sosiolog yang bekerja pada lima universitas di empat kota: Universitas Indonesia di Depok, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, Institut Pertanian Bogor di Bogor, dan Universitas Nusa Cendana di Kupang. Pada saat ini empat orang anggota di antaranya merupakan kandidat doktor di Universitas Nasional Australia, *Ecole des Hautes en Sciences Sociales* (EHESS) di Paris, Universitas Amsterdam, dan Universitas Leiden.

Tiga orang anggota merupakan dewan editor yang bertugas menelaah terjemahan artikel selaku mitra bestari. Anggota dewan ikut serta pula dalam menterjemahkan artikel, terutama di kala jumlah penerjemah yang tersedia terbatas, dan mereka melakukan telaah mitra bestari terhadap terjemahan sesama anggota. Selain itu, seorang anggota dewan berfungsi sebagai ketua dewan editor, anggota kedua bertindak sebagai penghubung dewan dengan anggota tim yang terlibat dalam penerjemahan artikel, sementara anggota ketiga bertugas sebagai penghubung dewan dengan tim manajer GD. Seorang alumni program sarjana membantu dewan dalam mengedit, merancang, dan menata GD dalam bahasa Indonesia.

Satu bulan sebelum ISA menerbitkan GD, dewan editor mengundang tiap anggota tim untuk menerjemahkan satu atau dua artikel, tergantung pada ketersediaan mereka. Karena jarak antara universitas para anggota – berkisar antara 65 dan 2.770 kilometer – semua komunikasi dilakukan melalui surat elektronik atau media sosial.

Tantangan yang dihadapi tim Indonesia dalam proses penerjemahan lebih kurang sama dengan pengalaman tim editorial Rumania sebagaimana diuraikan dalam GD

“Banyak konsep dasar belum secara resmi diterjemahkan”

6.3 (September 2016). Selain perbedaan mendasar antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, banyak konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial, terutama yang mutakhir, belum secara resmi diterjemahkan sehingga banyak akademisi cenderung membiarkan konsep-konsep dasar dalam bahasa Inggris tanpa diterjemahkan. Selain merujuk pada kamus dan publikasi akademik serta profesional, dan mendiskusikan isu-isu spesifik terjemahan di antara kami sendiri, anggota dewan kadang-kadang harus berkonsultasi dengan profesional terkait, dan sesekali mencari klarifikasi dari para penulis artikel GD yang sedang diterjemahkan.

Setelah menelaah semua terjemahan artikel termasuk yang mereka terjemahkan sendiri dan berkomunikasi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah terjemahan yang masih tersisa, para anggota dewan melangkah ke tahap tata letak. Langkah-langkah ditempuh untuk memastikan bahwa GD telah diterjemahkan dan disusun sesuai dengan pedoman ISA, sebelum rancangan akhir disampaikan kepada editor *Global Dialogue*.

Setelah publikasi *Global Dialogue* di situs Web ISA, dewan mengirim tautan GD ke Ikatan Sosiologis Indonesia (ISI), Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), berbagai departemen dan program studi sosiologi, perpustakaan, pusat penelitian, dan ikatan mahasiswa sosiologi serta sosiolog perorangan dari berbagai universitas. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Kamanto Sunarto
<kamantos@yahoo.com>

> Memperkenalkan Tim Editorial Indonesia



Kamanto Sunarto adalah Guru Besar Emeritus Sosiologi di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia memperoleh gelar PhD dalam bidang pendidikan dari Universitas Chicago pada tahun 1980. Minat penelitiannya saat ini adalah tentang pendidikan tinggi dan sejarah sosiologi. Ia adalah anggota Komite Penelitian ISA bidang Sosiologi Pendidikan (RC04) dan Sejarah Sosiologi (RC08).



Hari Nugroho saat ini adalah mahasiswa program doktor pada Institut Antropologi Kebudayaan dan Sosiologi Pembangunan, Universitas Leiden, Belanda dan dosen pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Ia memperoleh gelar MA pada Institut Studi-studi Sosial (ISS), Universitas Erasmus, di Den Haag, Belanda. Minat penelitiannya adalah pada kajian perburuhan, gerakan-gerakan sosial, politik lokal dan ketidaksetaraan sosial. Hari adalah anggota Komite Penelitian ISA bidang Gerakan-gerakan Perburuhan (RC44), Kelas-kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47), dan Gerakan Sosial, Aksi Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48).



Lucia Ratih Kusumadewi adalah mahasiswa program doktor pada *Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologique (CADIS), École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, Perancis*. Ia menyelesaikan *Diplôme d'Études Approfondies (DEA)* dari EHESS pada tahun 2006. Saat ini ia adalah dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Minat penelitian utamanya adalah pada tema gerakan-gerakan sosial, identitas, agama, kelompok muda, dan pendidikan. Lucia adalah anggota Komite Penelitian ISA bidang Sosiologi Agama (RC22) dan Kelas-kelas Sosial dan Gerakan Sosial (RC47).



Fina Itriya adalah dosen dan peneliti pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Saat ini ia sedang menyelesaikan PhD di College of Arts and Social Sciences (CASS), Universitas Nasional Australia. Proyek penelitiannya berjudul *The Biosociality and Redefinition of Identity of Newly Disabled Women in Post-Earthquake Indonesia* yang menggunakan metode etnografi untuk memahami kehidupan sosial perempuan disabilitas dalam bencana. Ia tertarik pada isu-isu gender, kebudayaan dan masyarakat, ketubuhan, disabilitas, bencana, dan hak-hak asasi manusia. Fina adalah anggota Ikatan Sosiologi Indonesia dan Komite Penelitian ISA bidang Tubuh dan Ilmu-ilmu Sosial (RC54).



Indera Ratna Irawati Pattinasarany adalah dosen pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Bidang studi yang diminatinya adalah stratifikasi dan mobilitas sosial, ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan sosiologi pendidikan. Indera memperoleh gelar Doktor dalam bidang sosiologi dari Universitas Indonesia dan Master of Arts dari Universitas Negara Bagian Michigan, AS. Ia adalah anggota Komite Penelitian ISA bidang Sosiologi Pendidikan (RC04) dan Stratifikasi Sosial (RC28). Ia juga anggota Ikatan Sosiologi Indonesia.



Benedictus Hari Juliawan adalah dosen di Program Pascasarjana Kajian Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, Indonesia. Ia juga peneliti di Sahabat Insan, sebuah Organisasi non-pemerintah lokal yang bergerak dalam isu-isu buruh migran. Ia menyelesaikan *Master of Philosophy* pada tahun 2007 dan PhD di Studi Pembangunan pada Universitas Oxford, Inggris Raya di tahun 2011. Minat penelitian utamanya adalah gerakan perburuhan, pekerja migran, politik identitas, dan ekonomi informal.



Mohamad Shohibuddin adalah mahasiswa program doktor pada Departemen Sosiologi dan Antropologi, Universitas Amsterdam, Negeri Belanda. Ia adalah dosen pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Komunitas, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Indonesia. Ia pernah menjadi Direktur Eksekutif Institut Sajogyo, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada isu-isu seputar kemiskinan, pembangunan pedesaan, dan perubahan agraria. Minat penelitiannya adalah tentang kebijakan pembaharuan agraria, studi konflik dan perdamaian, dan gerakan-gerakan sosial di pedesaan.



Dominggus Elcid Li adalah Direktur Eksekutif sekaligus peneliti pada Lembaga Tata Kelola Sumber Daya dan Perubahan Sosial (IRGSC). Ia memperoleh PhD dari Universitas Birmingham, Inggris Raya pada tahun 2014 dan mengikuti program pascadoktor antara tahun 2014-2015 di Sekolah Kennedy Harvard di Boston, AS. Ia saat ini adalah dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana di Kupang, Indonesia Timur. Minat penelitiannya adalah dalam bidang migrasi, perdagangan manusia, partisipasi demokrasi, dan sosiologi pedesaan.



Antonius Ario Seto Hardjana menyelesaikan gelar doktornya dari Institut Etnologi, Universitas Goethe Frankfurt, Jerman. Ia memperoleh MA di Universitas Passau, Jerman, pada bidang Studi Asia Tenggara. Saat ini ia adalah dosen di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Minat penelitiannya adalah dalam bidang studi kebudayaan, media sosial, dan jaringan sosial.
